



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MK+

MK+ Edisi Khusus 2025

Sumitro Djojohadikusumo

Guru Ekonomi
Agung Indonesia



Foto Cover Sumitro Institute

COVER DETAIL:

Foto pada artikel
Ekonomi dan
Bisnis berjudul
“Pujian Sumitro”
yang terbit pada
8 Juli 1989.

Salah satu
koleksi file
Sumitro Institute.



MK+ adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

Daftar Isi

Visi Seorang Begawan 06–09

Membangun Gagasan Sejak Muda 10–15

Arsitek Arah Ekonomi Indonesia Pasca-Kemerdekaan 16–19

Program Benteng:
Fondasi Awal Kelahiran
Pengusaha Nasional
Indonesia 22–27



Dari Rotterdam Hingga
Jakarta School of
Economics 28–33

Galeri Foto
Sumitro Institute 34–35

Kerja Sunyi di Balik
Kedaulatan Fiskal
Indonesia 36–41

Ekonomi Untuk Rakyat,
Bukan Pasar Bebas 42–47

Ekonom Muda yang
Lantang di Panggung Dunia 50–55



Guru, Sahabat, dan Teladan
di Mata Orang Terdekat 56–61

Antara Begawan Ekonomi
dan Guru Kehidupan 64–69

Timeline Sumitro
Djojohikusumo 70–75



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi Rahmat Widiarta. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ahmady Muhajiri. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Rita Nurhayati, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwawidhu Widayanti, Ni Made Ary Ramayanti, Arfindo Brian Santoso. **Redaktur Foto:** Dodi Achmad Siregar, Irfan Bayu P., Tubagus Prihastomo. **Desain Grafis dan Layout:** Tubagus Prihastomo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst.6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Setelah lulus dari HBS, Sumitro Djojohadikusumo muda kuliah ke Rotterdam dan meraih gelar Bachelor of Arts dalam waktu dua tahun tiga bulan, rekor tercepat di Netherlands School of Economics. Ia melanjutkan studi ke Sorbonne, Paris dan meraih gelar doktor ekonomi di Rotterdam pada 1943.

foto:
Sumitro
Institute



**desain
ilustrasi:**
Biro KLI,
Kemenkeu

Visi Seorang Begawan

“Pembangunan ekonomi bukan semata soal angka, melainkan proses perubahan struktural yang menentukan harkat suatu bangsa.”
— **Sumitro Djojohadikusumo**

Sumitro Djojohadikusumo
dalam Seminar ‘Peranan Pasar
Modal dalam Pengerahan Dana
Investasi’ di Flores Room Hotel
Borobudur, Jakarta, 1985.

foto:
TEMPO



Menteri Keuangan periode 1952-1953 dan 1955-1956 ini juga dikenal sebagai seorang arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia menduduki beberapa posisi penting di bidang ekonomi baik di masa awal pascakemerdekaan maupun Orde Baru. Sosok pengagum Nehru dan Andre Malraux ini dianggap sebagai “Guru Ekonomi Agung” dalam sejarah Republik Indonesia.

Sepanjang perjalanan hidup Sumitro Djojohadikusumo, ia mengalami gejolak politik yang luar biasa. Ia bergerak di bawah tanah dengan

melawan Nazi di Belanda. Ia juga turut serta dalam diplomasi demi penegakan kemerdekaan Republik untuk mendapatkan pengakuan internasional. Putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo ini juga berjuang membangun Indonesia dengan menjadi menteri bidang keuangan dan ekonomi seraya menjadi pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sumitro muda dengan tajam menyimpulkan, “Pengangguran terselubung dan pekerjaan setengah waktu itu bukan soal budaya, tapi soal produktivitas dan struktur ekonomi yang timpang.”

Di balik sosok teknokrat dengan reputasi internasional, Sumitro juga adalah seorang ayah, pendidik, dan pribadi yang hangat. Ia berani mengambil risiko besar demi prinsip yang diyakini, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan pemerintahannya sendiri atau hidup di tanah asing. Hidupnya adalah kisah tentang kecerdasan yang berpadu dengan keberanian moral.

Jejak Awal Sang Pemikir: Dari HBS hingga Sorbonne

Sejak muda, Sumitro menorehkan prestasi akademik yang mencengangkan. Setelah menamatkan pendidikan di HBS, ia melanjutkan studi ke Rotterdam pada 1935. Dalam waktu hanya dua tahun tiga bulan, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Arts—rekor tercepat di Netherlands School of Economics. Ia kemudian melanjutkan studi ke Sorbonne, Paris, sebelum akhirnya meraih gelar doktor di Rotterdam pada 1943.

Disertasinya, *The People's Credit System during the Depression*, bukan sekadar karya ilmiah. Di balik halaman-halamannya, terselip jeritan hati seorang anak Jawa yang menyaksikan penderitaan rakyat akibat depresi ekonomi global.

“Pengangguran terselubung dan pekerjaan setengah waktu itu bukan soal budaya, tapi soal produktivitas dan struktur ekonomi yang timpang,” demikian Sumitro muda dengan tajam menyimpulkan.

Pandangan kritis tersebut menjadi fondasi dari seluruh karya dan kebijakan yang ia perjuangkan kelak. Ekonomi harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada angka atau kepentingan elit.

Merancang Jalan Ekonomi Indonesia

Jika Indonesia memiliki seorang arsitek ekonomi, maka Sumitro adalah tiangnya. Ia tercatat lima kali menjabat menteri di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di kancah internasional, ia menjadi anggota “lima ahli dunia” (Group of Five Top Experts) PBB, dan di dunia akademik, ia ikut mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)—almamater yang kemudian melahirkan generasi-generasi ekonom penerus bangsa.

Sebagai menteri, Sumitro melahirkan berbagai gebrakan. Program Urgensi Perekonomian atau yang dikenal sebagai “Rencana Sumitro” (1951), berupaya mentransformasi industri rakyat menjadi industri modern berskala besar. Ia juga menggagas Program Benteng, kebijakan afirmatif untuk mendorong pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam dunia usaha yang kala itu didominasi non-pribumi.



Menteri Luar Negeri (Menlu) Tunisia, Habib Ben Yahya menyematkan bintang kehormatan “Wissam Jamhuriyah Republik” kepada Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, 1992.

foto:
TEMPO

Saat menjabat Menteri Perdagangan (1968–1973), Sumitro mengambil langkah berani dengan melarang impor mobil mewah serta mengatur lisensi otomotif agar industri lokal memiliki ruang tumbuh. Pandangan visionernya tentang industrialisasi, swasembada pangan, hingga investasi asing yang berpihak pada tenaga kerja Indonesia, kelak menjadi cetak biru pembangunan nasional.

“Bagi Sumitro, kebijakan publik bukan sekadar penstabil, tetapi instrumen untuk merespons ketidakseimbangan struktural,” tutur sejarawan ekonomi Thee Kian Wie merangkum esensi pemikiran Sumitro.

Pengakuan Internasional atas Sang Begawan

Kontribusi Sumitro tidak hanya diakui di tanah air, tetapi juga oleh dunia internasional. Ia dianugerahi sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya Bintang Mahaputera Adipradana (II) dari Indonesia, Grand Cross of Most

Exalted Order of the White Elephant dari Thailand, Grand Cross of the Crown dari Belgia, serta tanda kehormatan dari Malaysia, Tunisia, dan Prancis.

Karya-karyanya pun terbilang monumental. Lebih dari 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris ia hasilkan, termasuk karya refleksifnya *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (2000). Tulisan-tulisan tersebut membuktikan bahwa Sumitro adalah intelektual yang tak pernah berhenti berpikir, menulis, dan melawan stagnasi.

Namun, hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah dituding sebagai penyelundup, dicap pemberontak PRRI/Permesta, dan terpaksa hidup sepuluh tahun sebagai pelarian. Di masa-masa sulit itulah sisi manusianya terlihat jelas. Seorang ayah yang harus menjaga keluarganya, seorang intelektual yang tetap menulis di pengasingan, dan seorang pejuang yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Luka-luka itu justru mempertegas keberaniannya untuk tetap berdiri di jalannya sendiri.

Menggali Relevansi Sumitronomics

Kini, ketika dunia tengah memasuki babak baru perekonomian global—bergeser dari kapitalisme dan sosialisme menuju *the age of ambition*, era di mana negara-negara saling berebut dominasi ekonomi—pemikiran Sumitro kembali menemukan relevansinya.

Guru Besar FEB UI, Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, menegaskan bahwa dunia kini menghadapi risiko resesi dan depresi akibat ambisi ekonomi negara-negara besar. Dalam konteks ketidakpastian global ini, ia menyebut pemikiran Sumitro sebagai warisan intelektual yang layak dijadikan pijakan.

“Berbagai pemikiran Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo masih relevan membantu Indonesia bertahan di tengah ketidakpastian. Ia adalah salah satu dari tiga orang yang layak disebut begawan ekonomi Indonesia dan bisa diteladani hingga kini,” ujar Dorodjatun dalam Simposium Nasional ‘Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia.’

Menurut Dorodjatun, kekuatan pemikiran Sumitro terletak pada kelengkapannya, mulai dari filosofi, visi, dan misi pembangunan ekonomi; teori ekonomi yang solid; analisis tajam; hingga formulasi kebijakan berbasis kepentingan rakyat. Gagasan tentang ekonomi kerakyatan yang ia usung sejak masa awal kemerdekaan hingga kini tetap menjadi inspirasi berbagai kebijakan publik di Indonesia.

Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya di Rapat Paripurna terkait APBN 2026 pada 23 September 2025 lalu menyatakan untuk menjadi negara maju dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka

menengah, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

Jejak Pemikiran yang Tak Pernah Padam

Warisan Sumitro bukan hanya berupa kebijakan, melainkan sebuah cara pandang yang lahir dari pergulatan hidupnya. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya nasib rakyat pada mekanisme pasar. Pemerintah harus hadir secara aktif dengan menentukan arah, melindungi yang lemah, dan memastikan pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan nyata di tengah masyarakat.

Dalam perjalanan panjangnya, Sumitro bukan hanya seorang akademisi yang menulis buku dan teori. Ia adalah seorang pengembara pemikiran, yang gagasannya kerap lahir dari pertemuan antara idealisme intelektual dan realitas politik. Dari ruang kuliah hingga kursi kabinet di berbagai era, ia selalu membawa pesan yang sama bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada manusia, pada rakyat.

Dua dekade setelah kepergiannya, nama Sumitro tetap hidup dalam setiap diskusi tentang ekonomi Indonesia. Ia menjadi cermin seorang intelektual sejati yang tidak hanya berpikir di ruang kelas atau menulis di atas kertas, tetapi berani membawa ide ke gelanggang sejarah.

Di sana, di tengah pusaran krisis, ambisi global, serta harapan bangsa, nama Sumitro Djojohadikusumo akan selalu dikenang sebagai Begawan Ekonomi—pejuang yang membangun fondasi bangsa dengan pena, pikiran, dan keberanian. (Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

foto:
TEMPO

Sumitro Djojohadikusumo (ke 2 dari kiri) saat promosi Doktor Kartomo Wirosohardjo di Universitas Indonesia, Jakarta 1983.



Membangun Gagasan Sejak Muda

**“Tersenyumlah dalam menghadapi
kemalangan, beranilah menantang
bahaya, tegarlah dalam kekalahan, selalu
rendah hati akan kemenangan.”
— Sumitro Djojohadikusumo**

Lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917, Sumitro Djojohadikusumo adalah putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo dan Raden Ayu Siti Katoemi Wirodihardjo. Ia tumbuh dalam keluarga priayi Jawa yang menjunjung tinggi pendidikan dan diskusi intelektual.

Ayahnya, Margono, menjabat sebagai *Inspecteur van het Volkscredietwezen*— lembaga ini kemudian berubah menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB) dan kini dikenal sebagai Bank Rakyat Indonesia. Margono juga dikenal sebagai perintis ekonomi nasional dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada 1946. Dari sang ayah, Sumitro mewarisi logika berpikir yang tajam dan keteguhan moral. Ibunya, Siti Katoemi, adalah sosok perempuan tangguh dan penuh kasih, yang menumbuhkan kepekaan

sosial dan empati dalam diri anak-anaknya. Perpaduan disiplin intelektual dari sang ayah dan kehalusan budi dari sang ibu menjadi fondasi nilai yang membimbing Sumitro sepanjang hidupnya.

Kedudukan sosial dan kiprah profesional ayahnya berpengaruh besar pada arah hidup Sumitro, termasuk pilihannya menekuni ilmu ekonomi. Sejak mahasiswa, ia aktif menulis di berbagai media. Dalam buku semi-dokumenter *“In het land van de overheerser: Indonesiërs in Nederland 1600–1950,”* Sumitro tercatat sebagai kontributor majalah *Soeara Roepi*, terbitan Roekoen Pelajar Indonesia di Belanda (didirikan 1936). Bersama pamannya, Saroso, ia rutin menulis artikel ekonomi *“vol met cijfers, tabellen en voetnoten”* – yang penuh angka,

tabel, dan catatan kaki. Tulisan-tulisan itu bukan sekadar latihan akademis, melainkan cara seorang anak muda dari Hindia Belanda bersuara di tengah dunia yang kerap meremehkannya.

Rumah keluarga Djojohadikusumo di masa kecil bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang penuh percakapan. Diskusi-diskusi intelektual kerap hadir di meja makan atau ruang tamu, membuat Sumitro kecil terbiasa mendengar dan bertanya. Ia tumbuh di tengah suasana yang meyakinkan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi bekal untuk mengabdikan. Bagi Sumitro kecil, rumah juga berperan sebagai ruang diskusi, tempat ide-ide besar bertumbuh dari percakapan sehari-hari.

Tahun 1935, Sumitro lulus dari sekolah menengah atas Belanda (Hogere Burgerschool – HBS) di Batavia. Di masa ini, ia mulai membedakan antara sekadar menjadi pelajar cerdas dan

menjadi manusia yang bermanfaat.

Kegelisahan Sumitro kian kuat.

Pertanyaan mengenai mengapa bangsanya miskin di tanah yang kaya?

Mengapa sistem ekonomi kolonial begitu timpang? mengusik hatinya.

“Ilmu pengetahuan tidak ada artinya jika tidak dipakai untuk mengangkat harkat bangsa sendiri,” ucap Sumitro suatu kali. Tekad tersebut kemudian menjadi kompas hidup Sumitro.

Dengan beasiswa, Sumitro berlayar ke Belanda untuk menempuh studi di Rotterdam School of Economics. Rotterdam bukan sekadar kota perantauan, tetapi laboratorium intelektual yang menempanya. Di sana, ia belajar di antara dinginnya salju Eropa dan dinginnya perlakuan diskriminatif terhadap ‘pribumi’ dari Hindia Belanda.

Namun, alih-alih patah hati, pengalaman itu justru menguatkan daya juangnya. Ia meyakini prinsip



Rapat Panitia Perdagangan India dan Panitia Perdagangan Indonesia dengan Sumitro Djojohadikusumo di Kedutaan India, Taman Surapati, Jakarta.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1950

hidup “*Smile in the face of adversity, be contemptuous of danger, undaunted in defeat and magnanimous in victory*” atau “tersenyumlah dalam menghadapi kemalangan, beranilah menantang bahaya, tegarlah dalam kekalahan, selalu rendah hati akan kemenangan.”

Tak puas hanya belajar di Rotterdam, ia melanjutkan studi ke Prancis—negara yang pernah menjadi pusat revolusi dunia. Di sana, ia memperluas cakrawala pemikiran, memadukan pendekatan ekonomi, filsafat, dan sejarah sosial. Sumitro membentuk bukan hanya gagasan, tetapi juga karakter berpijak pada tanah air, namun berpandangan global.

“Pembangunan ekonomi bukanlah soal angka semata, melainkan perubahan struktural yang menentukan martabat bangsa,” demikian Sumitro kerap menuturkan.

Ekonomi sebagai Jalan Pengabdian

Sejak kecil, Sumitro sudah akrab dengan buku-buku tebal yang memenuhi rak di rumah keluarganya di Kebumen. Salah satunya ensiklopedia negara-negara Eropa milik sang ayah. Dari halaman demi halaman itulah imajinasinya melayang jauh ke negeri-negeri asing yang saat itu hanya bisa ia bayangkan lewat peta usang dan gambar-gambar di buku. Di kota kecil itu, ia mulai memupuk mimpi besar memahami dunia lewat ilmu pengetahuan.

Kegemarannya membaca membuatnya memandang ekonomi tidak sebatas hitungan angka. Ia melihatnya sebagai ilmu yang menyentuh sisi paling manusiawi, tentang bagaimana keadilan bisa memberi ruang hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Bagi Sumitro muda, ekonomi adalah soal moralitas. Ekonomi dapat menjadi alat pembebasan ketika dikelola dengan benar.

Tak puas hanya belajar di Rotterdam, ia melanjutkan studi ke Prancis—negara yang pernah menjadi pusat revolusi dunia. Di sana, ia memperluas cakrawala pemikiran, memadukan pendekatan ekonomi, filsafat, dan sejarah sosial. Sumitro membentuk bukan hanya gagasan, tetapi juga karakter berpijak pada tanah air, namun berpandangan global.

Di luar ruang belajar, ia punya hobi mendaki gunung. Dari puncak-puncak itu, ia belajar arti risiko, strategi, dan ketahanan diri. Semua itu kelak menjadi bekal penting bagi seorang pengambil keputusan. Ilmu, bagi Sumitro, bukan sekadar tangga menuju karier, melainkan jalan hidup yang penuh makna.

Menjelang kemerdekaan, ia pulang ke tanah air. Bukan hanya dengan gelar akademik dan tumpukan buku, tapi juga membawa semangat baru. Indonesia harus membangun sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pembangunan, menurutnya, tak cukup dihitung dengan angka-angka, melainkan harus terasa dalam keadilan yang nyata. Dari Kebumen ke Rotterdam, dari halaman rumah sederhana hingga ke panggung Republik, Sumitro tumbuh sebagai teknokrat sekaligus pemikir bangsa.



Rapat Panitia Perdagangan India dan Panitia Perdagangan Indonesia dengan Sumitro Djojohadikusumo di Kedutaan India, Taman Surapati, Jakarta.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1950

Pilihan topik disertasi Sumitro mencerminkan kedekatan gagasannya dengan realitas rakyat. Ia menulis tentang perkreditan rakyat di masa depresi ekonomi, sebuah kajian yang lahir dari pengalaman masa kecilnya. Saat ikut sang ayah dalam perjalanan dinas, ia sering menyaksikan antrean panjang petani di kantor perkreditan. Pinjaman yang mereka cari digunakan untuk sekadar agar dapur tetap mengepul di musim paceklik. Disertasi berjudul *Het Volkscredietwezen in de Depressie* (Kredit Rakyat di Masa Depresi) yang ditulisnya dalam bahasa Belanda menjadi penanda awal jalan hidupnya sebagai ilmuwan, ekonom profesional, sekaligus pelayan masyarakat.

Dalam prakata terjemahan karyanya itu, Sumitro menegaskan ilmu ekonomi tak bisa dilepaskan dari kehidupan nyata, dari denyut masyarakat yang tengah bergulat dengan persoalannya sendiri. Keyakinan itu tidak lahir di ruang kosong. Ia tumbuh di tengah krisis global 1930-an, saat dunia dilanda depresi, dan ia menyaksikan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia kian berat.

Alih-alih melemah, situasi itu justru meneguhkan kesadarannya. Ia percaya seorang ekonom sejati harus menautkan ilmu dengan keberpihakan sosial. Puluhan tahun kemudian, dalam sebuah retrospeksi ketika menerima Piagam Penghargaan Hatta di Jakarta tahun 1985, ia sempat menyebut dirinya diliputi “sindrom nostalgia”. Namun, di balik kerendahan hatinya, ia tetap teguh



Suasana jamuan makan di Istana dalam suatu resepsi. Pada meja sebelah kiri dari kiri ke kanan: tampak Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo, Perdana Menteri Wilopo, Ibu Fatmawati Soekarnodan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, sedang beramah tamah di ruang makan.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1952

pada satu hal bahwa ilmu ekonomi baru bermakna jika dihayati dalam konteks sosialnya. Hanya dengan cara itu, ia bisa memberi arti nyata bagi masyarakat.

Jabatan sebagai Jalan, Bukan Tujuan

Sekembalinya dari Eropa pada 1946, Sumitro Djojohadikusumo tak menunggu lama untuk mengabdikan ilmunya. Ia pulang dengan semangat muda dan tekad besar untuk ikut menata Republik yang baru lahir. Ia memulai langkahnya sebagai staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir, di masa ketika Indonesia masih meraba-raba arah sistem politiknya. Sebelumnya, ia sempat dipercaya menjadi Kuasa Usaha di Kedutaan Besar RI di Amerika Serikat dan turut serta dalam berbagai perundingan penting di luar negeri, termasuk sebagai anggota delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949.

Di usia yang masih belia, Sumitro langsung berada di jantung kekuasaan. Kursi menteri, yang bagi banyak orang adalah puncak karier, justru dipandanginya sebagai ladang pengabdian. Bagi Sumitro, jabatan hanyalah jalan, bukan tujuan. Ia ingin membuktikan bahwa teori yang selama ini ia pelajari di ruang akademik dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, dan bahwa mimpi besar bangsa tidak perlu dibayar dengan kompromi atas nilai-nilai.

Sumitro dikenal sebagai sosok langka yakni teknokrat yang berpijak pada angka sekaligus visioner yang berani menatap jauh ke depan. Kekuasaan tidak pernah membuatnya silau. Dalam beberapa kesempatan, ketika idealismenya bertabrakan dengan kepentingan politik, ia memilih mundur. Sikap tersebut jarang ditemui di panggung politik.

Sumitro dikenal sebagai sosok langka yakni teknokrat yang berpijak pada angka sekaligus visioner yang berani menatap jauh ke depan. Kekuasaan tidak pernah membuatnya silau. Dalam beberapa kesempatan, ketika idealismenya bertabrakan dengan kepentingan politik, ia memilih mundur. Sikap tersebut jarang ditemui di panggung politik.

Masa demokrasi parlementer membuatnya ikut merasakan pasang-surut politik kabinet. Dalam Kabinet Natsir (1950–1951), ia dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, tepat saat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Setahun kemudian, di Kabinet Wilopo (1952), ia duduk sebagai Menteri Keuangan. Namun, seperti banyak menteri lain di era itu, masa jabatannya singkat, bukan karena gagal bekerja, melainkan karena rapuhnya stabilitas politik. Pola ini berulang di Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956), di mana Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan.

Walau hanya sebentar, jejak yang ia tinggalkan tetap membekas. Sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, ia melahirkan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP), yang dirancang untuk memperkuat industrialisasi

dengan menyatukan industri besar dan kecil, terutama di desa-desa. Dari sinilah lahir Program Benteng—sebuah upaya membangun kelas menengah pribumi, melindungi pengusaha lokal, dan mengurangi dominasi asing dalam perekonomian.

Dalam bukunya *Persoalan Ekonomi di Indonesia* (1953), Sumitro menegaskan pentingnya melindungi petani dan rakyat desa dari cengkeraman asing. Perdagangan, menurutnya, harus “dipribumikan” agar mereka tidak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri. Namun, idealisme itu sering kali berbenturan dengan kenyataan politik. Energi yang seharusnya dicurahkan untuk membangun bangsa, justru banyak tersedot oleh perebutan pengaruh di kalangan elite.

Tak hanya sekali Sumitro merasakan getirnya politik. Di masa Orde Lama, ia dituduh terlibat gerakan kontra-revolusioner. Pada masa Orde Baru, tuduhan politik kembali menghantamnya hingga ia harus menepi. Tetapi semangatnya tak pernah padam. Ia terus menulis, mengajar, dan membimbing generasi ekonom muda, mereka yang kelak melanjutkan cita-cita besarnya untuk Indonesia.

Bagi Sumitro, kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ekonomi tidak sekadar alat legitimasi, tetapi jembatan menuju kesejahteraan yang merata. Sumitro berperan sebagai seorang ekonom, menteri, sekaligus seorang penghubung lintas generasi. Dari masa sebelum kemerdekaan hingga Indonesia modern, ada satu benang merah yang ia pegang teguh yaitu bahwa ilmu, keberanian, dan integritas harus selalu diabdikan untuk kemajuan bangsa.

(Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Arsitek Arah Ekonomi Indonesia *Pasca- Kemerdekaan*

“Masalah pokok ekonomi Indonesia ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat, berdasarkan kekuatan sendiri, dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak,”

**— Sumitro
Djojohadikusumo**

Sumitro Djojohadikusumo geram akan sistem perekonomian di tanah air yang menurutnya hanya berpihak pada kepentingan pihak penguasa. Kondisi tersebut mengusik sanubari pria yang berasal dari kalangan priayi itu. Indonesia yang sedang berjuang sebagai negara merdeka menurut Sumitro seharusnya memiliki kebijakan ekonomi yang memihak pada rakyat.

“Pembangunan ekonomi bukanlah semata-mata soal menaikkan angka produksi nasional, melainkan juga soal pembagian hasil-hasil pembangunan itu secara adil untuk rakyat.” ujarnya.

Gagasan itu muncul ketika ia sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Erasmus Rotterdam,

Belanda. Di medio Mei tahun 1940, Ayah dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo itu masih baru menginjak usia 23 tahun.

Saat itu kondisi di “Negara Kincir Angin” tersebut sedang tidak kondusif. Pasukan Jerman menginvasi Belanda. Bahkan selama Rotterdam Blitz, Sumitro hampir terbunuh oleh bom Luftwaffe yang menghancurkan salah satu dinding kamarnya.

Namun kondisi itu tetap membuat Sumitro muda tak goyah. Pria kelahiran Kebumen, 29 Mei 1917 itu berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Het Volkscredietwezen in de Depressie* atau “Kredit Rakyat di Masa Depresi”. Sumitro lulus dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1942 dan menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi.

Sumitro kembali ke tanah air pada April 1946. Awal karirnya adalah sebagai staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan mulai aktif di Kementerian Keuangan. Dia sering mendapat tugas sebagai delegasi Indonesia dalam berbagai dialog internasional. Seperti menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Tahun 1949, hingga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Sekembalinya dari Belanda, Sumitro kembali mematangkan rencananya untuk memperjuangkan perekonomian Indonesia.



Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr. Sumitro Djojohadikusumo memberikan amanat pada upacara pembukaan Akademi Perniagaan Indonesia di Universitas Indonesia (Universitas Indonesia).

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1951

Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi babak tersulit yang baru dimulai, membangun sebuah negara dari nol. Setelah ratusan tahun berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, Indonesia tidak hanya menghadapi kekosongan birokrasi, tapi juga kondisi ekonomi yang porak-poranda dan nyaris tanpa pijakan.

Sumitro kemudian menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir pada tahun 1950. Indonesia saat itu masih usia balita dan baru menjadi negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Situasi waktu itu kacau dan penuh ketidakpastian.

Di masa itu, Sumitro sebagai salah satu dari sedikit orang Indonesia yang memiliki pemahaman mendalam tentang teori ekonomi modern tengah menggodok upaya dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi pascakemerdekaan.

“Masalah pokok ekonomi Indonesia ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat, berdasarkan kekuatan sendiri, dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak,” paparnya.

Sengkarut Beban Keuangan Indonesia

Dalam buku memoar tentang kisah-kisah dari tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia berjudul *“Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an”* yang ditulis Thee Kian Wie Tahun 2005, disebutkan bahwa Sumitro dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949 berpendapat bahwa Indonesia hanya mau mengambil alih utang dalam negeri sebelum perang. Menolak utang pascaperang sebesar 2 miliar gulden dengan argumen uang itu digunakan untuk membiayai agresi militer Belanda terhadap RI.



Menlu Ida Anak Agung Gde Agung (depan, ke-3 dari kanan) dan Menkeu Sumitro Djojohadikusumo (depan, ke-4) disambut Menpen Sjamsuddin Sutan Makmur, PM Burhanuddin Harahap, dan Menteri Pertanian Mohammad Sardjan di Kemayoran, sepulang dari konferensi pembatalan hasil KMB di Jenewa.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1956

Indonesia dengan pembayaran yang sudah mencapai 82 persen dari keseluruhan utang selama lima tahun. Meski demikian, pada akhirnya Kabinet Harahap yang menjabat sejak Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 berhasil membatalkan kesepakatan pembayaran pinjaman tersebut.

Dalam perjanjian KMB Tahun 1949 juga disebutkan bahwa Indonesia harus membayar upah standar Eropa kepada 17.000 pegawai eks-Belanda selama dua tahun. Hal ini turut menjadi beban keuangan negara. Besaran upah tersebut tentunya membuat pegawai sipil pribumi merasa cemburu. Tak hanya itu, keuangan negara juga dibebani lagi oleh 26.000 tentara eks-KNIL yang harus ditampung oleh Indonesia.

Sementara itu, kedatangan Jepang ke Indonesia juga turut menghancurkan sejumlah infrastruktur peninggalan Belanda. Negara di Asia Timur itu tidak melakukan pembenahan akan infrastruktur yang rusak di Tanah Air. Seperti transportasi, komunikasi, fasilitas irigasi, hingga pembangkit listrik.

Dari sisi aset keuangan dalam mata uang asing, cadangan devisa Indonesia juga terus menurun dari 458 juta dolar AS pada 1945 menjadi 142 juta dolar AS pada 1949. Anne Booth dalam *The Indonesian Economic in the Nineteenth and twentieth Centuries* (1998) menuturkan, rata-rata kebutuhan impor mencapai 137 juta dolar per bulan. Dengan ini, Indonesia dalam kondisi tidak cukup untuk mengimpor kebutuhan produksi nasional.

Pada sisi ekspor, Anne Booth juga menjabarkan kontribusi ekspor Indonesia pada perdagangan dunia turun drastis. Pada tahun 1953 – 1966, volume ekspor Indonesia hanya tumbuh kurang dari 1 persen per tahun. Padahal, pada awal 1920-an, Indonesia menjadi salah satu eksportir terkemuka di dunia. Pada tahun yang sama, dijelaskan John



Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang baru Mr. Sujono Hadinoto sedang berbicara memberikan sambutan di depan para pegawai, tampak pula menteri yang lama Menteri Sumitro Djojohadikusumo (berkacamata) di sebelah Menteri Mr. Sujono

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1951

“Belanda menyetujui pembatalan tuntutan pembayaran utang sebesar 2 miliar gulden yang kontroversial,” tulis Thee Kian Wie.

Untuk pembayarannya, Howard Dick dalam *Emergence of A National Economy, an Economic History of Indonesia*, menyebut bahwa Indonesia sampai menghabiskan hadiah kemerdekaan dari Amerika Serikat berupa pinjaman dari Export-Import Bank sebesar 100 juta dolar AS untuk pembayaran tersebut.

Sedangkan, ekonom yang juga Wakil Presiden Indonesia ke-11, Boediono, dalam bukunya “*Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah*” Tahun 2016 menyebut bahwa utang tersebut telah membebani keuangan

R. Hanson yang dikutip oleh Anne Booth, perdagangan dunia mengalami pertumbuhan sekitar 7 persen per tahun, naik drastis sejak tahun 1800.

Sumitro Plan

Saat Indonesia lahir sebagai negara merdeka, situasi ekonomi tanah air masih mewarisi sistem ekonomi peninggalan kolonial. Dengan kondisi sangat timpang dan eksploitatif, sebagian besar sektor produksi dikuasai oleh perusahaan asing. Sistem distribusi barang tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan persentase pengusaha pribumi hampir tak punya tempat dalam tatanan tersebut.

Sumitro melihat ketimpangan itu sebagai persoalan utama. Dalam pemikirannya, jika tidak ada reformasi ekonomi yang menyentuh akar persoalan struktural, maka kemerdekaan politik hanyalah simbol tanpa makna nyata. Berbeda dengan Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara, yang ingin fokus pada pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, ia punya visi lain, yaitu industrialisasi. Ia percaya bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak bisa bergantung pada cangkul dan sawah saja.

Pemerintah, lanjut Sumitro, harus secara aktif menentukan dan memengaruhi arah produksi, industri, maupun investasi. Kebijakan ini pada akhirnya memberikan porsi besar bagi pengusaha pribumi atau lokal untuk berkembang. Negara hadir di tengah mereka dengan pemberian kredit dan lisensi.

Pemikiran tersebut melahirkan Sumitro Plan atau Rencana Urgensi Perekonomian sebagai “Cetak Biru Industrialisasi Indonesia” sekitar April 1951 ketika Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Rencana tersebut bertujuan membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat melalui industrialisasi dan mengurangi

Tujuan Dasar Sumitro Plan

- Menumbuhkan dan membina para pelaku usaha Indonesia (pribumi) sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau “Indonesianisasi”.
- Mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing
- Membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada para Importir Indonesia.
- Memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha di Indonesia.

ketergantungan terhadap negara asing. Sumitro Plan kemudian diimplementasikan dalam Program Ekonomi Gerakan Benteng atau Program Benteng.

Sumitro menekankan pentingnya pembangunan industri dasar seperti pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, pupuk, dan sebagainya. Ia percaya bahwa tanpa penopang industri dasar yang kuat, Indonesia tidak akan mampu keluar dari ketergantungan pada produk-produk impor.

Rencana Sumitro juga memperlihatkan keberpihakan kepada pengusaha pribumi. Ia mendorong perlindungan industri dalam negeri dari serbuan produk luar negeri, bukan dalam semangat anti- globalisasi, tetapi sebagai langkah strategis agar industri nasional bisa tumbuh dan bersaing.

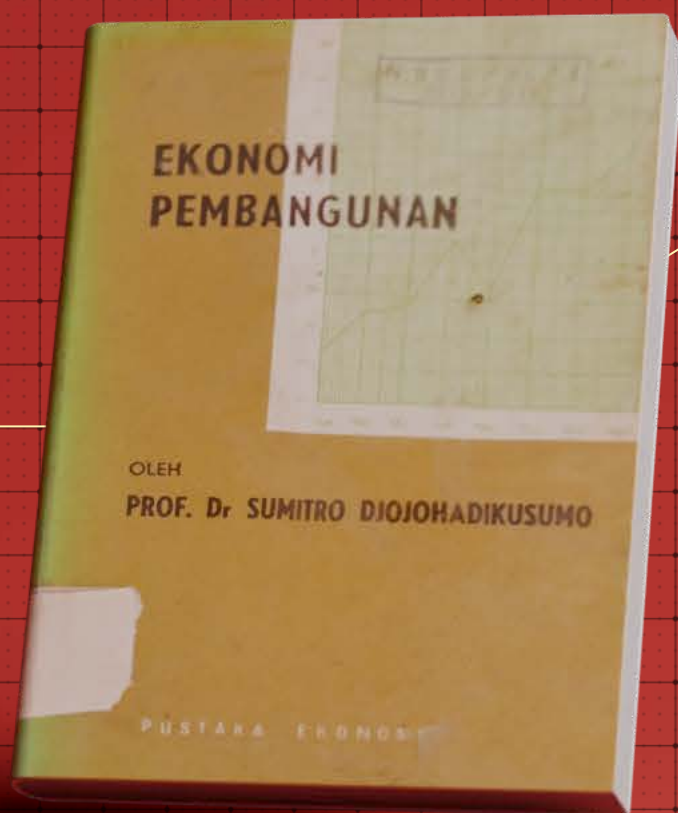
Sumitro menyadari bahwa ekonomi yang kuat harus dibangun dari dalam. Jika suatu negara seperti Indonesia memiliki ketergantungan jangka panjang pada impor, hal itu hanya akan membuat Indonesia terjebak sebagai konsumen di pasar dunia, bukanlah sebagai pemain utama.

Sumitro Plan bertujuan untuk membangun industri di Jawa dan Sumatera dengan menggunakan uang negara dalam waktu dua tahun. Berbagai pabrik yang termasuk di dalamnya adalah pabrik semen dan tekstil untuk mendorong Indonesia memproduksi barang sendiri daripada terus menerus melakukan impor.

Namun seperti banyak rencana bertekad kuat lainnya, realisasi di lapangan tak selalu berjalan mulus. Dalam dua tahun, belum ada pabrik yang benar-benar berdiri, sehingga rencana ini pun diperpanjang menjadi tiga tahun dengan tujuan mulia, yaitu Indonesia harus berdiri di kaki sendiri melalui industri yang dimiliki. (Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Buku Ekonomi Pembangunan karya Sumitro Djojohadikusumo diterbitkan oleh PT Pembangunan Djakarta pada tahun 1955, dengan hak cipta tercatat sejak 1954. Karya ini menjadi salah satu tonggak awal lahirnya istilah Development Economics di dunia, bahkan sebelum konsep serupa dipopulerkan oleh ekonom Barat seperti Sir Arthur W. Lewis.

foto:
Sumitro
Institute



**desain
ilustrasi:**
Biro KLI,
Kemenkeu

Program Benteng: Fondasi Awal Kelahiran Pengusaha Nasional Indonesia

“Kita akan menemui banyak kekecewaan dan perasaan berkecil hati, tetapi kita akan menghadapinya dengan mata terbuka. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah lebih kuat, tetapi dapat dilakukan. Soalnya ialah jangan berputus asa.”

— **Sumitro Djojohadikusumo**

Pada awal tahun 1950-an, Indonesia yang baru saja merdeka menghadapi masa transisi penting. Kala itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang dinamakan “Big Five” masih beroperasi di tanah air. Tekanan politik untuk mengurangi dominasi warisan ekonomi kolonial tersebut semakin menguat. Bagi banyak kalangan nasionalis, langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyempurnakan Revolusi Kemerdekaan.

Namun, waktu itu kondisi ekonomi masih sangat buruk. Inflasi amatlah tinggi. Bahkan Thee Kian Wie menyebut anggaran pemerintah defisit hingga Rp1,7 miliar (kurs saat itu).

Untuk membangun kembali perekonomian yang hancur akibat perang dan revolusi, kondisi Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan modal dan keahlian asing. Oleh sebab itu, meski Indonesia sedang berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme, kerja sama dengan pihak asing tetap tak terelakkan. Tangan asing masih dianggap sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional.

Tantangan utama membangun ekonomi kala itu adalah bagaimana menjalin kerja sama dengan pihak luar tanpa membuat Indonesia kembali bergantung secara berlebihan. Sumitro

Djojohadikusumo menilai negara perlu memiliki peran aktif dalam mengarahkan jalannya perekonomian, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pemerintah, menurutnya sebaiknya tetap hadir dalam menentukan arah produksi, industri maupun investasi.

Sebagai jalan tengah, Sumitro menawarkan gagasan dan keberanian untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan modern, sembari tetap terbuka pada dunia internasional. Peran dominan negara dalam mengatur jalannya perekonomian terlihat melalui kebijakan yang lahir pada 1950-

Presiden Soekarno menyampaikan amanah pada Pelantikan Menteri Kabinet Natsir di Istana. Tampak di depan Moh. Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX serta di belakang (dari kiri) Tandiono Manu, Sumitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, R. Pandji Suroso, Wahid, Hasjim, Leimena dan Harsono Tjokroaminoto.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1950



an, yakni “Rencana Sumitro” yang menitikberatkan pada industrialisasi dan “Program Benteng.”

Kisah Program Benteng

Dari pengalaman masa kecil hingga penelitian akademiknya tentang kredit pedesaan, Sumitro sampai pada kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pasar. Tanpa campur tangan pemerintah melalui pendidikan, pelatihan, koperasi, dan akses modal, maka usaha kecil akan sulit berkembang.

“Hal ini sudah menjadi pemikiran saya sejak 1930-an. Rencana industri itu adalah hasil pertumbuhan pemikiran-pemikiran ini,” papar Sumitro.

Ketika menjabat sebagai Menteri Perindustrian tahun 1950, Sumitro merumuskan Program Benteng sebagai

strategi memberi ruang lebih besar bagi pengusaha Indonesia. Tujuannya tidak sekadar melindungi industri dalam negeri, tapi juga mencetak kelas menengah baru yang kuat dan mampu bersaing.

Salah satu ide utamanya adalah memberikan lisensi impor dan kredit khusus bagi pengusaha lokal. Impor dipilih karena butuh modal relatif kecil dibandingkan industri berat, sehingga dianggap realistis untuk pemula. Sumitro sendiri realistis soal hasilnya.

Ia pernah mengatakan, “Saya tidak punya khayalan tentang apa yang mungkin terjadi, tapi saya pikir, kalau kita memberikan bantuan kepada sepuluh orang, tujuh bisa saja ternyata menjadi parasit, tetapi kita bisa mengharapkan yang tiga menjadi pengusaha,” ujarnya.

Program ini resmi berjalan sejak

Duta Besar Inggris W. Kermode sedang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Moh. Natsir dalam acara pertemuan dan perkenalan antara Kabinet Natsir dengan Corps Diplomatik dan UNCI. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Wahid Hasjim, Pandji Suroso, Sumitro Djojohadikusumo, Pellaupessy.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1950



Pada akhirnya, Program Benteng bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan refleksi dari visi jangka panjang Sumitro tentang pentingnya intervensi negara dalam menumbuhkan pengusaha nasional.

1950 hingga 1957 di era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Selama tujuh tahun, Program Benteng menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling progresif pada masa awal kemerdekaan. Ia membuka jalan bagi lahirnya pengusaha nasional pertama, memberi ruang bagi kelas menengah baru untuk bertumbuh.

Banyak dinamika yang terjadi, mulai dari revisi kebijakan hingga hadirnya generasi pengusaha baru. Namun, dinamika tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran berharga bagi bangsa yang sedang merintis kemandirian ekonomi.

Salah satu terobosan penting dalam Program Benteng adalah keberanian untuk terus beradaptasi. Pada awalnya, kebijakan kepemilikan saham mayoritas bagi warga negara Indonesia memang memunculkan perdebatan di kalangan pelaku usaha, bahkan berimbas pada dinamika politik. Namun, kondisi ini justru menjadi titik evaluasi berharga. Sumitro menyadari adanya kelemahan aturan berbasis identitas.

Saat kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1955, Sumitro melakukan penyempurnaan besar. Aturan berbasis identitas diganti dengan persyaratan teknis yang lebih rasional, yakni kewajiban membayar uang muka

dalam jumlah tertentu bagi pemohon lisensi impor.

Dengan langkah ini, fokus program beralih dari semata-mata soal asal-usul menjadi soal kapasitas dan kesungguhan. Prinsip ini menegaskan pandangan Sumitro bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah pengusaha yang tangguh dan benar-benar siap membangun perekonomian nasional.

“Apakah kita harus memperkecil jumlah impor? Kalau begitu, maka akan membawa kita kepada suatu keadaan yang lebih celaka lagi,” tegasnya, menandai cara pandang yang pragmatis.

Pada akhirnya, Program Benteng bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan refleksi dari visi jangka panjang Sumitro tentang pentingnya intervensi negara dalam menumbuhkan pengusaha nasional.

Ia mencoba menyeimbangkan semangat nasionalisme ekonomi dengan kewajaran praktik bisnis. Dari sini, benih-benih kelas menengah pengusaha Indonesia mulai tumbuh, menjadi sebuah fondasi awal menuju ekonomi yang lebih mandiri.

Keterbatasan dan Capaian Program Benteng

Kemandirian ekonomi dan upaya menumbuhkan pengusaha lokal ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Richard Robinson dalam bukunya *Indonesia: The Rise of Capital* (1986) mencatat bahwa dalam praktiknya, banyak penerima fasilitas Program Benteng bukanlah pengusaha yang benar-benar siap, melainkan individu yang memiliki jaringan dengan pelaku usaha lain yang lebih berpengalaman. Alhasil, lisensi impor kerap dialihkan atau dikelola bersama pihak lain.

Meski begitu, data lain menunjukkan sisi positif. Teguh Sri Pambudi dan Harmanto Edy Djatmiko dalam buku *Man of Honor, Kehidupan, Semangat,*

dan Kearifan William Soeryadjaya (2012) menuliskan bahwa Program Benteng berhasil melahirkan sekitar 700 pengusaha baru. Angka itu terbilang besar untuk ukuran Indonesia di masa awal kemerdekaan. Namun, membangun sesuatu memang berbeda dengan menjaga dan mengembangkannya.

Banyak pengusaha yang terjun lewat program ini masih minim pengalaman. Bukan karena mereka enggan belajar, melainkan karena ekosistem bisnis saat itu memang belum matang. Bayangkan saja, tiba-tiba ada lisensi impor di tangan, tapi belum terbiasa mengelola rantai pasok, jaringan dagang, hingga strategi bersaing di pasar. Tak heran jika sebagian kemudian menggandeng mitra lain yang lebih berpengalaman untuk menjalankan usaha.

Polanya sederhana, pemegang lisensi mengurus izin, sementara mitra mengatur urusan operasional, mulai dari pengadaan barang, logistik, hingga distribusi. Di satu sisi, ini menjadi jalan tengah yang praktis. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa cita-cita awal Program Benteng belum sepenuhnya tercapai. Banyak pengusaha lokal masih berperan sebagai pemegang izin, bukan pelaku utama usaha.

Walau begitu, sulit menafikan arti penting program ini. Program Benteng tetap menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Ia membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengusaha lokal, sekaligus memberi pelajaran bahwa membangun kelas bisnis nasional tidak cukup hanya dengan regulasi. Butuh pendidikan, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan.

Program Benteng tetap menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Ia membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengusaha lokal, sekaligus memberi pelajaran bahwa membangun kelas bisnis nasional tidak cukup hanya dengan regulasi.

Sumitro sendiri, dalam kata pengantar disertasinya yang dibukukan dengan judul *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (1989), menegaskan bahwa perubahan struktural ekonomi memang memerlukan waktu panjang, bahkan bisa melintasi beberapa generasi.

“Kurang disadari bahwa perombakan itu, merupakan suatu proses yang memerlukan pentahapan sendiri, bahwa pembangunan dalam arti perubahan struktural mencakup kurun waktu beberapa generasi,” ujar Sumitro dalam kata pengantar yang ditulis untuk disertasinya yang dibukukan, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, pada Januari 1989.

Namun, arah kebijakan nasional terus bergerak cepat. Setelah terbentuknya Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 1957, fokus pembangunan beralih ke sistem ekonomi terpimpin. Pergeseran ini membuat Program Benteng secara bertahap dihentikan dan tidak lagi menjadi landasan utama kebijakan ekonomi nasional.



Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr. Sumitro Djojohadikusumo (bertopi) dan anggota-anggota Direksi Pelabuhan sedang memeriksa timbunan barang di gudang Pelabuhan Tanjung Priok.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA,
19 April 1951

Meski penuh tantangan, Program Benteng tidak sepenuhnya berjalan tanpa hasil. Dari program inilah lahir sejumlah pengusaha lokal yang kelak dikenal luas. Misalnya PT Transistor Radio Manufacturing yang kemudian melahirkan Panasonic Gobel, milik keluarga Gobel, pelopor elektronik di Indonesia. Ada juga Indonesia Service Company milik Hasjim Ning, sosok yang sering dijuluki “raja mobil Indonesia” pada masanya. Dari Sumatera Utara muncul nama TD Pardede, pendiri Pardedetex yang menjadi salah satu pemain penting di industri tekstil.

Tak ketinggalan, ada Achmad Bakrie, ayah dari Aburizal Bakrie, yang merintis usaha keluarga hingga berkembang menjadi salah satu konglomerasi

terbesar di Indonesia. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa meski banyak hambatan, Program Benteng tetap menjadi batu loncatan bagi lahirnya sejumlah tokoh penting dunia usaha nasional.

Lebih dari itu, gebrakan-gebrakan Sumitro dalam membangun Indonesia demi kemakmuran rakyat merefleksikan semangat yang tak pernah padam sebagaimana yang ia gaungkan, “Kita akan menemui banyak kekecewaan dan perasaan berkecil hati, tetapi kita akan menghadapinya dengan mata terbuka. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah lebih kuat, tetapi dapat dilakukan. Soalnya ialah jangan berputus asa.”

(Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Dari Rotterdam Hingga *Jakarta* *School of* *Economics*

“Seorang guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menyiapkan muridnya menghadapi dunia,” — Sumitro Djojohadikusumo

Gaya necis. Berpakaian sipil lengkap dengan jas dan dasi, menjadi ciri khas Prof. Sumitro Djojohadikusumo saat mengajar siswanya. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Ketika mengajar di ruang kelas, ia jarang menggunakan papan tulis.

Sepintas kenangan itu dirasakan ekonom dan politikus Faisal Basri yang sempat mengikuti kelas Prof. Sumitro selama dua semester di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sekarang bernama Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Angkatan 1978 itu merasa beruntung bisa mendapat bekal dari ekonom generasi pertama tersebut lewat mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Seminar Perekonomian Indonesia.

“Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkuliahan yang saya ikuti, pandangan Prof. Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar,” ujar Faisal dalam blognya.

Lembaran memori akan isi kuliah Prof. Sumitro membekas di ingatannya. Faisal mengakui yang paling ia ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof. Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Pada umumnya, negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuat Prof. Sumitro didapuk sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld.

Tak hanya Faisal Basri, tangan dingin Sumitro turut berjasa dalam menelurkan anak didik berprestasi yang kemudian juga menjadi “begawan perekonomian tanah air”. Sebut saja JB Sumarlin, Ali Wardhana, serta Emil Salim dan Widjojo Nitisastro. Mereka adalah murid-muridnya sewaktu dia aktif mengajar dan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI).

Tokoh intelektual bidang lingkungan hidup yang juga Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1993), Emil Salim dalam Media Keuangan Kementerian Keuangan menyebut kalau dia dan Sumarlin merupakan asisten dosen Prof. Sumitro. Menteri Perhubungan (1973-1978) ini membantunya untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan, sedangkan Sumarlin untuk mata kuliah Keuangan Publik.



Sumitro Djojohadikusumo dalam Seminar ‘Peranan Pasar Modal dalam Pengerahan Dana Investasi’ di Flores Room Hotel Borobudur, Jakarta, 1985.

foto:
TEMPO

Sosok Sumitro bukan orang sembarangan. Ia merupakan priayi ningrat Jawa yang memiliki darah ilmuwan ekonomi di dirinya. Ia adalah putra dari Margono Djojohadikusumo, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang juga menjadi pendiri salah satu bank “plat merah” terbesar di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946.

Pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1927 itu juga mengenyam pendidikan yang mumpuni di bidang ekonomi. Pada tahun 1935, Sumitro melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ekonomi atau Nederlandsche Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Kemudian tahun 1937 hingga 1938, dirinya ke Prancis untuk menempuh kursus jurusan filosofi dan sejarah di Universitas Paris atau lebih dikenal sebagai Collège de Sorbonne atau La Sorbonne.



Sumitro Djojohadikusumo (no. 2 dari kiri) bertanya jawab dengan Njoo Hong Hwie (no. 2 dari kanan) pada upacara promosi Njoo Hong Hwie menjadi Doktor Ekonomi Universitas Indonesia di Aula Universitas Indonesia. Tampak Presiden Universitas Indonesia Imam Santoso (no. 3 dari kiri).

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
23 Sept
1954

Sekembalinya ke Belanda pada Mei 1940, Sumitro menyelesaikan disertasinya bersamaan dengan dimulainya penyerbuan Nazi Jerman ke Belanda, bagian dari Perang Dunia II. Perjuangan Sumitro tak sia-sia. Ia berhasil meraih gelar doktor ekonomi pada tahun 1943 dari *Nederlandse Economische Hogeschool* di Rotterdam, kampus yang kini dikenal sebagai Erasmus University Rotterdam.

Disertasinya yang berjudul *Het Volkscredietwezen in de Depressie* (Kredit Rakyat di Masa Depresi) bukan hanya sebagai syarat kelulusan. Namun, juga menjadi salah satu karya ekonomi yang relevan dan masih dicari hingga dekade berikutnya.

Saat berkuliah di Rotterdam, Sumitro mempunyai dosen yang bukan orang sembarangan. Ia beruntung dapat mengenyam ilmu dari ekonom legendaris sekaligus ilmuwan Belanda yang merupakan peraih nobel pertama di bidang ekonomi, yaitu Prof. Jan Tinbergen.

Tokoh ini dikenal dengan Tinbergen Rule, teori yang menekankan pentingnya satu alat kebijakan untuk mencapai satu tujuan ekonomi. Teori ini mungkin terdengar teknis, tapi bagi Sumitro, inilah kunci yang membuka cara pandanginya tentang bagaimana negara seharusnya merencanakan dan mengelola ekonominya.

Saat Indonesia baru saja merdeka pada 1946, Sumitro pulang ke Indonesia dan langsung bekerja. Ia tak hanya masuk ke jajaran pemerintahan, tapi juga mulai membangun dunia akademik dari nol, setelah sekelompok mahasiswa mendekatinya saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 1950.

Mereka memintanya menjadi Dekan FE-UI. Puncaknya terjadi pada tahun 1951, ketika ia diangkat menjadi Dekan FE-UI setelah dekan sebelumnya, Soenarjo Kolopaking mengundurkan diri. Sekalipun ia bukan dekan pertama, namun Sumitro-lah yang menjadikan FE-UI sebagai institusi mandiri, sebab sebelumnya jurusan itu masuk dalam Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan.

Prof. Sumitro menjadi Dekan FE-UI selama medio tahun 1951-1957. Di tangan beliau, fakultas ini direformasi menjadi sekolah ekonomi ternama dan bahkan disegani. Nama Jakarta School of Economics yang ia sematkan menjadi sebuah anggukan simbolis kepada London School of Economics yang memang menjadi kiblat para ekonom dunia.

Dukungan Negara Barat untuk Pendidikan

Pascakemerdekaan, pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di bidang ekonomi masih dalam tahap awal. Ford Foundation dalam laporan *Celebrating Indonesia: 50 Years with the Ford Foundation 1953-2003* memperkirakan bahwa pada tahun 1949 hanya ada sepuluh ekonom terlatih penuh melayani populasi Indonesia yang kala itu masih berjumlah lebih dari 70 juta jiwa.

“Tidak ada orang lain yang berkualifikasi Sumitro,” kenang Suhadi Mangkusuwondo, yang memimpin delegasi mahasiswa.

Pada masa itu, tak banyak yang meramalkan bahwa putra seorang pegawai negeri sipil kolonial yang ramping dan cerdas ini mampu membangun fakultas akademik di universitas sekaliber Universitas Indonesia (UI) serta memiliki pemikiran ekonomi bangsa yang besar.

Lebih dari itu, Sumitro adalah seorang pria dengan beragam dimensi. Seorang menteri, akademisi, ahli strategi kebijakan, internasionalis, dan terkadang seorang pemberontak. Ia memiliki keyakinan kuat akan peran kepemimpinan yang harus dijalannya. Keunggulan Sumitro sulit ditandingi. Ia adalah seorang pembangun institusi yang ulung.

“Beberapa orang di Yayasan sering berbicara tentang membangun institusi, tetapi jika Anda berfokus pada individu, menemukan orang-orang yang paling cemerlang dan mereka akan membangun institusi. Sumitro jelas salah satu dari orang-orang itu,” kata John Bresnan, perwakilan awal Ford Foundation di Indonesia.

Sedangkan ekonom Thee Kian Wee, dalam tulisannya pada tahun 2001, menyebut Sumitro dengan ungkapan “tak terbantahkan lagi sebagai pelopor studi ekonomi modern di Indonesia.”

Sebagai Dekan FE-UI sekaligus Menteri Keuangan, pada tahun 1952 Sumitro mulai membangun fondasi fakultas dari nol. Di bawah kepemimpinannya, FE-UI memperoleh ruang kuliah pertamanya, administrasi layak fungsi, perpustakaan, dan unit penelitian yang kredibel, serta staf pengajar yang kuat.

“Sebelum Sumitro bergabung, kami bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak. Kami memberikan kuliah di aula konser, gedung-gedung darurat, dan bahkan di bawah pepohonan di kampus,” kenang ekonom Emil Salim pada tahun 1993.

Emil menuturkan bahwa teori-teori ekonomi yang terinspirasi Belanda pada saat itu sangat abstrak dan tidak cocok untuk negara berkembang yang baru merdeka.

“Teori-teori itu terlalu teoritis dan filosofis,” kata Emil Salim.

Di sisi lain, Sumitro merangkul bidang Ekonomi Pembangunan yang sedang berkembang dan menjadikannya pusat kurikulum FE-UI yang baru pada tahun 1955–1956.

“Sumitro-lah yang memperkenalkan ekonomi makro ke Indonesia,” tambahnya.

Pada tahun yang sama, sebagian besar dosen Belanda telah meninggalkan FE-UI. Mengantisipasi hal ini, Sumitro memprakarsai kolaborasi dengan University of California, Berkeley. Melalui kemitraan tersebut, dengan dukungan Ford Foundation, para profesor Amerika Serikat datang ke FE-UI.

Dari situlah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berbakat dikirim ke institusi-institusi seperti The University of California Berkeley, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Cornell University, dan New York University (NYU) untuk belajar sekaligus mengawali era baru dalam pendidikan ekonomi Indonesia.

“Seorang guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menyiapkan muridnya menghadapi dunia,” pesan Sumitro.

Satu perubahan yang paling terlihat dalam pendidikan ekonomi Indonesia menurut perencana nasional Saleh Afiff adalah munculnya budaya debat antara mahasiswa dan dosen.

“Sebelumnya, para profesor dianggap tidak pernah salah,” ujar Saleh.

Rupanya keinginan bermitra dengan Berkeley bukanlah upaya pertama Sumitro dalam mengamankan kerja sama akademis internasional. Sebagai penganut kuat metode pendidikan Anglo-Saxon, ia sebelumnya telah mencari dukungan Inggris melalui British Council. Ia kemudian mendekati Cornell melalui Rockefeller Foundation, namun kedua upaya tersebut gagal.

Di sisi lain, ia berhasil meluncurkan proyek bersama MIT sehingga ketika kabinet Sukiman mendirikan Biro Perencanaan Negara pertama di Indonesia, Sumitro mengundang sembilan konsultan asing untuk membantu, dipimpin oleh Benjamin Higgins dari MIT. Para cendekiawan

ini yang bukan merupakan orang Belanda maupun Indonesia, memainkan peran penting dalam penelitian dan pembuatan kebijakan.

Latar Belakang Kolaborasi Pendidikan Ford Foundation

Pada tahun 1951, Sumitro mengajukan proposal resmi permintaan bantuan pendidikan senilai 400 ribu dolar AS kepada Ford Foundation melalui ekonom Everett Hawkins. Butuh waktu lima tahun hingga proposal tersebut diterima Ford Foundation yang kemudian menyediakan bantuan senilai 2 juta dolar AS. Dana pendidikan tersebut lalu dipakai untuk pengiriman ahli maupun pengajar Amerika ke Indonesia sampai pemberian beasiswa bagi mahasiswa FE-UI.

Selain itu, sisa dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya para pemimpin masa depan di bidang ekonomi. Pada tahun 1953, sebagai Dekan FE-UI, Sumitro mendirikan dua pusat penelitian yaitu Seminar Administrasi Bisnis dan Pusat Penelitian Sosial untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh para kandidat doktor di fakultas.

Pada November 1953, Pusat Penelitian Sosial diubah menjadi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Pada tahun 1956, Seminar Administrasi Bisnis bergabung ke dalam LPEM. LPEM menjadi lembaga kunci untuk pengembangan kepemimpinan, eksperimen kebijakan, dan apa yang disebut sebagai “Indonesianisasi”, menggantikan warisan kolonial dengan keahlian nasional. Lembaga ini juga menjadi jembatan antara dunia akademis dan pemerintahan.

**Sumitro Djojohadikusumo di
depan mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas
Indonesia/ FE-UI, Depok, 1993.**

**foto:
TEMPO**



Banyak yang bergabung dengan LPEM mulanya karena tertarik oleh karisma Sumitro. Selain itu, tak dapat dipungkiri pula daya pikat LPEM lainnya yang menarik para ekonom seperti penyediaan program magang, akses ke ekonom global, dan peluang pengembangan karier. Fasilitas tersebut mendukung para ekonom muda meraih prestasi nasional. Capaian tersebut tak lepas dari bimbingan Sumitro.

Pada tahun 1955, Sumitro juga mendirikan Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia (ISEI), yang kini menjadi salah satu organisasi profesional paling dihormati di Indonesia.

Pada awal 1960-an, FE-UI telah berkembang menjadi lembaga mandiri dengan kepemimpinan lokal yang kuat, dukungan pemerintah, dan pengaruh akademis di seluruh nusantara. Hal ini turut mendorong berdirinya fakultas ekonomi lain di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Pak Soemitro tidak sekadar dosen. Ia seorang perancang jalan berpikir ekonomi yang melampaui zaman,” ujar Emil Salim, dalam wawancara retrospektif UI pada 1997. (*Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari*)

Koneksi Global, Dedikasi Lokal

Nama besar Sumitro tak hanya dikenal di dalam negeri. Ia sempat menjadi kuasa usaha Indonesia di Washington DC dan aktif menulis dalam jurnal-jurnal internasional. Karya-karyanya tak tanggung-tanggung, lebih dari 130 buku dan makalah ia hasilkan antara tahun 1942 hingga 1994. Salah satu yang terakhir diterbitkan adalah *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang* (2000).

Pengakuan internasional pun mengalir. Ia kemudian dianugerahi sejumlah penghargaan dari dalam negeri maupun luar negeri:

1. Grand Cross of the White Elephant (Thailand)
2. Grand Cross of the Crown (Belgia)
3. Penghargaan dari Kerajaan Malaysia, Tunisia, dan Prancis
4. Bintang Mahaputra Adipradana II dari Pemerintah Indonesia

Sumitro Institute

Untuk melestarikan sekaligus mengembangkan gagasan besar Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pada 1 Juni 2025 resmi didirikan Sumitro Institute di Cibubur, Depok. Lembaga ini lahir dari inisiatif para intelektual, murid-murid lintas kampus Sumitro yang ingin menjadikan *Sumitronomics* sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan publik.

“Prof. Sumitro adalah yang pertama menulis buku bertajuk *Ekonomi Pembangunan* atau *Development Economics* secara spesifik hingga terbit pada tahun 1955, bahkan sangat besar kemungkinan lebih dulu ketimbang Sir Arthur Lewis yang kerap dianggap sebagai bapak ekonomi pembangunan,” tutur Haryo Budi Rahmadi selaku *caretaker* Sumitro Institute.

Sumitro Institute bukan sekadar mewadahi diskusi soal ekonomi, namun juga mendorong pembangunan yang inklusif, menyentuh pedesaan, menghidupkan koperasi, mengurangi kemiskinan, sekaligus memperkuat keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam *soft launching*-nya, sejumlah tokoh nasional hadir, mulai dari Anggito Abimanyu, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Thomas Djiwandono, Pandu Sjahrir, hingga Fithra Faisal Hastiadi. Mereka menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Sumitro, bahwa pembangunan sejati harus berfokus pada manusia dan kebangsaan serta mentransformasikan pemikiran akademis menjadi aksi nyata dalam kebijakan dan praktik pembangunan Indonesia.



foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

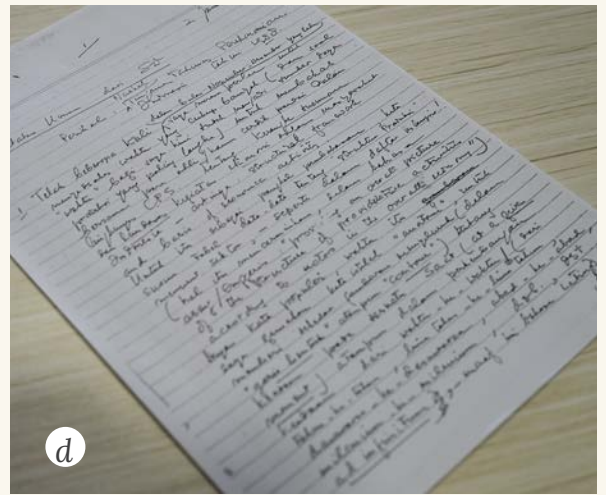
Galeri *Sumitro* Foto *Institute*



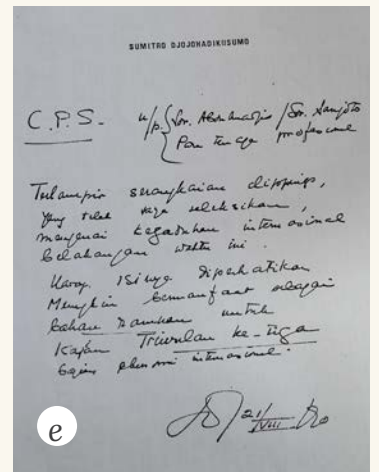
a. Tim Media Keuangan (MK+) saat mewawancarai Haryo Budi Rahmadi, *Caretaker* Sumitro Institute pada 17 Sept 2025.

b&c. Buku Ekonomi Pembangunan karya Sumitro dan Uang Rupiah yang ditandatangani Sumitro semasa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI dalam Kabinet Wilopo, merupakan dua dari sekian banyak legasi Sumitro Djojohadikusumo yang menjadi koleksi di Sumitro Institute.





d&e. Salinan arsip catatan tulisan tangan Sumitro Djojohadikusumo



f. Acara peresmian Sumitro Institute yang dihadiri oleh (urutan dari paling kiri) Fithra Faisal Hastiadi (Ekonom dan Dosen FEB-UI), Pandu Sjahrir (CIO Danantara), Anggito Abimanyu (Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), Thomas Djiwandono (Wakil Menteri Keuangan RI), Fadli Zon (Menteri Kebudayaan RI), Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI), Ubaidillah Nugraha (Ketua Ikatan Alumni FE-UI), dan Haryo Budi Rahmadi (Caretaker Sumitro Institute) di Depok, 1 Juni 2025.

foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

Kerja Sunyi di Balik Kedaulatan Fiskal Indonesia

“Kedaulatan politik hanya akan berarti jika kita memiliki kedaulatan fiskal. Tanpa itu, kita akan selalu bergantung pada kekuatan lain.” – Sumitro Djojohadikusumo

Sejarah Indonesia sering dikenang melalui cerita-cerita heroik, dari pertempuran di garis depan hingga tarik-ulur politik di meja perundingan. Namun, sesungguhnya ada bentuk perjuangan lain yang jarang disorot. Perjuangan dari mereka yang bekerja sunyi di ruang rapat sempit dan di balik tumpukan kertas. Dari sanalah, perlahan tapi pasti, fondasi negara ini dibangun.

Sumitro Djojohadikusumo pernah terlibat dalam berbagai perundingan, dari Linggarjati, Renville, Konferensi Meja Bundar, hingga misi diplomatik ke berbagai negara. Dalam dirinya terpadu ketajaman analisis dan keahlian diplomasi praktis. Namun, di sisi lain dia juga seorang ekonom yang dengan tekun menata ulang sistem keuangan

negara. Dari balik meja kerjanya, Sumitro merumuskan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Perannya sebagai arsitek fiskal Indonesia tampak saat ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Pertama, di Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kedua kalinya, sekitar dua tahun kemudian di Kabinet Burhanuddin Harahap, tepatnya pada 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Sebelumnya, ia pernah juga menjabat

sebagai Menteri Perdagangan dan Industri di Kabinet Mohammad Natsir pada 6 September 1950 hingga 27 April 1951.

Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia, keadaan keuangan republik muda begitu genting. Kas negara hampir kosong, inflasi melonjak, sementara birokrasi masih mewarisi pola kolonial yang kaku dan tidak relevan. Sistem anggaran berantakan, pencatatan sering tidak sinkron, dan pegawai keuangan lebih terbiasa melayani pemerintahan Hindia Belanda ketimbang mengelola keuangan sebuah negara merdeka.

Dalam suasana penuh keterbatasan itu, Sumitro tekun menghitung neraca, meneliti dokumen, dan lebih jauh lagi ia menanamkan cara pandang baru bahwa sebuah negara merdeka harus berdaulat atas keuangannya sendiri.

“Kedaulatan politik hanya akan berarti jika kita memiliki kedaulatan fiskal. Tanpa itu, kita akan selalu bergantung pada kekuatan lain,” begitu salah satu prinsip yang sering ia ulang.

Orang-orang yang pernah bekerja bersamanya mengingat sosoknya yang sederhana tetapi tegas. Di tengah malam, ia bisa tetap duduk di meja kerja dengan setumpuk laporan di hadapannya, membubuhkan catatan kecil di pinggir kertas dengan tulisan tangan rapi. Kepada staf-staf muda, ia memberi instruksi disertai penjelasan mengapa sebuah pencatatan harus tertib, laporan harus akurat, dan disiplin dalam mengelola uang negara menjadi bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.

Bagi banyak orang, pekerjaan Sumitro mungkin tampak teknis dan membosankan. Namun, dari ketekunan dan kegigihannya, lahirlah sistem fiskal yang membuat republik ini bisa bertahan.



Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur (PERI–Hazairin) mengucapkan sumpah secara Islam pada pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap di Istana Negara. Tampak (kanan-kiri): Menkeu Sumitro Djojohadikusumo, Menkeh Lukman Wiradinata, Waprem II Harsono Tjokroaminoto, Waprem I R. Djanu Ismadi, dan PM Burhanuddin Harahap.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
12 Agustus
1995

Setiap Rupiah Adalah Titipan Rakyat

Tahun-tahun awal Indonesia merdeka, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana negara muda ini bisa membiayai dirinya sendiri. Saat itu pundi-pundi keuangan negara masih rapuh. Penghasilan utama datang dari ekspor komoditas seperti karet dan kopi yang harganya ditentukan oleh pasar internasional. Sementara itu, kebutuhan rakyat tidak bisa menunggu. Pangan harus tersedia, barang modal untuk membangun negeri harus diimpor, dan roda pemerintahan harus terus berjalan.

Pada September 1952, dalam sebuah pidato radio, Sumitro pernah mengungkapkan, “Dalam lapangan perekonomian nampak suatu ketegangan. Harga-harga dalam pasar dunia turun, kedudukan Indonesia sebagai eksportir makin jelek. Pemasukan barang berjumlah demikian banyak hingga melebihi jumlah nilai ekspor. Persediaan-persediaan moneter berupa devisen terpaksa digunakan. Keadaan keuangan negara membahayakan, tetapi tidak diketahui orang bagaimana besar bahaya yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itulah, Kabinet mulai menjalankan kewajibannya.”

Saat itu, inflasi tak terhindarkan. Uang dicetak untuk menutup defisit, tetapi tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi. Akibatnya, harga-harga melambung dan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Sistem anggaran yang diwarisi dari Belanda juga tak banyak membantu karena hanya menjadi catatan administratif, bukan alat perencanaan keuangan negara.

Di tengah carut-marut itu, Sumitro berpikir bahwa tambal-sulam kebijakan bukanlah jalan keluar. Ia menilai Indonesia harus segera melakukan pembangunan ekonomi yang bersifat struktural. Pembangunan sebagai sebuah proses yang harus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengangkat martabat Indonesia di mata dunia.

“Inilah yang akan menentukan apakah rakyat akan hidup lebih baik atau justru tetap terjebak dalam kesulitan,” begitu pandangan Sumitro.

Ketika dipercaya menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo (1952–1953), ia mulai menata ulang cara negara mengelola uangnya. Ia memisahkan dengan tegas antara perencanaan dan pelaksanaan, memastikan setiap rupiah yang keluar punya alasan yang jelas dan tujuan yang terukur.



Menteri Keuangan, Dr. Soemitro Djojohadikusumo didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Roeslan Abdulghani menyampaikan konferensi pers di hadapan wakil-wakil pers dalam dan luar negeri di Kementerian Penerangan. (tampak depan).

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1952

“Setiap rupiah yang dibelanjakan negara adalah titipan rakyat. Dan titipan itu harus kembali pada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” tegas Sumitro dalam salah satu kesempatan di hadapan jajaran Kementerian Keuangan.

Sumitro menanamkan fondasi tentang bagaimana seharusnya cara pandang pengelola keuangan negara terhadap ekonomi. Baginya, uang negara adalah milik rakyat, dan tugas pemerintah hanyalah mengelolanya dengan amanah.

Membangun Fondasi, Mencetak Kader

Jejak penting lain Sumitro di Kementerian Keuangan adalah upayanya membangun manusia di balik institusi. Menurutnya, reformasi tak mungkin berjalan tanpa aparatur yang paham dan terlatih. Karena itu, pada 31 Juli 1952, ia meluncurkan kursus jabatan Ajun Akuntan meliputi Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak melalui SK Menteri Keuangan No. 167941/UP.

Langkah ini sederhana, tapi visioner. Sumitro membentuk kader-kader baru yang menguasai akuntansi negara dan perpajakan, dua bidang inti pengelolaan keuangan publik. Sumitro tahu, aturan di atas kertas hanya akan jadi formalitas jika tak ditopang kemampuan sumber daya manusianya. Dari sinilah tumbuh tradisi pelatihan berkelanjutan yang kelak menjadi wajah pendidikan dan pelatihan di Kementerian Keuangan hingga sekarang.

Di bawah kepemimpinannya, pengaturan keuangan pusat dan daerah mulai dirintis. Di samping usaha pembangunan di Pulau Jawa, Sumitro juga memberi perhatian pada upaya memperkuat perekonomian di wilayah luar Jawa.

Ia menorehkan sejarah dengan memprakarsai penerbitan uang kertas pecahan Rp1,00 dan Rp2,50 yang ditandatangani langsung olehnya sebagai Menteri Keuangan. Pencetakan dilakukan di dalam negeri oleh Perusahaan Negara Arta Yasa. Momentum ini menjadi sebuah simbol awal kemandirian bangsa dalam mengelola keuangannya sendiri.

Sumitro juga menjalankan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Kala itu, birokrasi warisan kolonial masih kaku dan lamban, jauh dari semangat sebuah bangsa yang baru merdeka. Banyak pejabat masih terjebak dalam pola lama, sementara kebutuhan rakyat menuntut perubahan yang cepat.

Di luar tembok birokrasi, situasi ekonomi Indonesia masih belum ideal. Harga ekspor komoditas utama jatuh, impor terus membengkak, dan krisis menjadi kenyataan sehari-hari. Ketegangan politik pun merembet ke jalanan, dari peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera hingga perselisihan alokasi keuangan pusat-daerah di Sulawesi. Semua itu membuat suhu politik memanas, hingga akhirnya Kabinet Wilopo harus bubar pada 30 Juli 1953.

Program Benteng tetap menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Ia membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengusaha lokal, sekaligus memberi pelajaran bahwa membangun kelas bisnis nasional tidak cukup hanya dengan regulasi.

Di tengah gejolak itu, Sumitro memilih kembali ke dunia pendidikan, ke ruang akademik yang ia cintai dengan mendalam, dan mengabdikan diri sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI). Ia menjalankan peran lain yang tak kalah bermakna, yaitu menyiapkan generasi baru yang kelak akan melanjutkan cita-cita kemerdekaan.

Ekonomi untuk Manusia

Dua tahun setelah meninggalkan kursi menteri, Sumitro kembali dipercaya memegang tanggung jawab besar sebagai Menteri Keuangan di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956). Saat itu, desentralisasi fiskal belum matang, inflasi tinggi, dan terjadi praktik korupsi di kalangan pejabat tinggi.

Di tengah kondisi itu, Sumitro melancarkan kampanye antikorupsi dengan menggandeng Polisi Militer untuk menindak pejabat yang terbukti menyeleweng. Ia berupaya untuk menerapkan penegakan hukum dan

Selama hidupnya, Sumitro memang tidak ingin berhenti sebagai intelektual yang mengajar dan menulis saja. Ia berusaha mewujudkan keyakinannya melalui tindakan nyata yang memberi dampak bagi masyarakat Indonesia. Semangat ini pula yang mendorongnya terjun ke dunia politik dan memikul berbagai tanggung jawab penting di pemerintahan.

mengembalikan kepercayaan rakyat sekaligus memperbaiki wibawa pemerintah di mata dunia.

Pada masa ini pula, Sumitro memainkan peran penting dalam perundingan Finansial Ekonomi (Finek) yang dilaksanakan pada 7 Januari 1956. Hasilnya adalah keputusan keterikatan ekonomi Indonesia dengan Belanda, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Keputusan ini membuka jalan bagi kedaulatan penuh dalam kebijakan ekonomi dan fiskal.

“Kemerdekaan ekonomi berarti kita bebas menentukan arah sendiri, tanpa beban janji masa lalu yang mengikat tangan kita,” kata Sumitro dalam salah satu pernyataan persnya.

Kabinet Burhanuddin Harahap juga mencatat sejarah lain yaitu menyelenggarakan Pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955.

Dalam perjalanan singkat di kabinet ini, Sumitro membersihkan akar penyakit birokrasi dan memperjuangkan kedaulatan sejati di meja perundingan. Sumitro yang dikenali sebagai seorang sosialis-nasionalis juga meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus berakar pada harkat kemanusiaan dan berujung pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Dari keyakinan itulah lahir gagasannya tentang “Ekonomi Pancasila”, yaitu sebuah *moral economy* atau ekonomi berbasis nilai. Dalam pandangan Sumitro, kebijakan fiskal dan anggaran negara tidak cukup hanya dinilai dari efisiensi atau laju pertumbuhan. Lebih dari itu, ia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Visi ini tidak berhenti di ranah wacana. Program industrialisasi 1951–1952 dan Program Benteng adalah wujud konkretnya. Lewat Program Benteng, Sumitro berusaha menumbuhkan kelas pedagang pribumi agar mampu berdiri sejajar dan bersaing dengan pengusaha asing yang sudah lama mendominasi pasar domestik. Kebijakan ekonomi ala Sumitro lebih menekankan bagaimana upaya negara untuk memberi ruang bagi rakyatnya sendiri agar tumbuh, berdaya, dan bermartabat.

Selama hidupnya, Sumitro memang tidak ingin berhenti sebagai intelektual yang mengajar dan menulis saja. Ia berusaha mewujudkan keyakinannya melalui tindakan nyata yang memberi dampak bagi masyarakat Indonesia. Semangat ini pula yang mendorongnya terjun ke dunia politik dan memikul berbagai tanggung jawab penting di pemerintahan.



Menteri Keuangan Dr. Soemitro Djojohadikusumo sedang berpidato di hadapan para peserta Konferensi Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1952

Dalam prinsip yang dipegang Sumitro, ekonomi harus bermuara pada martabat manusia (*human dignity*) dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, negara berkewajiban memperjuangkan keamanan ekonomi rakyat dan kemandirian nasional. Perjuangan untuk menegakkan martabat manusia ini bahkan telah menjadi panggilan jiwanya, bagian tak terpisahkan dari pemikiran dan tindakan-tindakannya.

Lebih dari Angka

Masa jabatan Sumitro di Kementerian Keuangan tidak pernah panjang. Namun, warisan yang ia tinggalkan bertahan jauh melampaui batas waktu kepemimpinannya. Dari tangannya, lahir tradisi disiplin fiskal, dorongan transparansi anggaran, dan kebiasaan mengintegrasikan riset ekonomi ke dalam pengambilan keputusan negara.

Di luar jabatannya sebagai menteri, Sumitro tetap setia pada dunia ilmu. Sebagai penulis, akademisi, dan penasihat ekonomi, ia menorehkan jejak pemikiran yang luas. Antara 1942 hingga 1994, ia menulis sekitar 130 buku dan makalah berbahasa Inggris, memperkaya literatur ekonomi Indonesia maupun dunia. Lebih dari sekadar angka, capaian tersebut adalah bentuk dedikasi. Kiprah panjangnya sebagai pemikir pun diakui antara lain melalui penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana hingga Grand Cross dari berbagai negara.

Sejarah Kementerian Keuangan tidak bisa dilepaskan dari sosok-sosok yang membentuk jati dirinya. Salah satunya adalah Sumitro Djojohadikusumo. Ia menanamkan keyakinan bahwa sebuah bangsa tidak benar-benar merdeka jika tidak berdaulat atas keuangannya sendiri. Sumitro juga mewariskan kedisiplinan, ketekunan, dan memastikan mesin fiskal negara bekerja tertib, transparan, dan berpihak pada rakyat. (*Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari*)

Ekonomi untuk Rakyat, *Bukan Pasar Bebas*

*“Saya tidak percaya pada kebijakan semacam kuota dan restriksi kuantitatif, tetapi saya juga tidak percaya bisa menyerahkan segalanya pada kekuatan pasar sebagaimana adanya.” – **Sumitro Djojohadikusumo***

Sumitro Djojohadikusumo selalu meyakini bahwa ekonomi tak bisa dipisahkan dari semangat kebangsaan. Baginya, ekonomi bukan sekadar hitung-hitungan angka dan teori di ruang kuliah saja. Ekonomi adalah alat perjuangan, sebuah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan. Ia menolak gagasan pembangunan ekonomi harus dibayar dengan ketergantungan pada modal asing tanpa kendali, yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru yang lebih halus.

Sudrajat Djiwandono, ekonom yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, mengenang Sumitro Djojohadikusumo sebagai sosok panutan. Bagi Sudrajad, Sumitro adalah seorang sosialis, nasionalis, dan patriotik, sekaligus teladan yang ia kagumi sejak muda, bahkan jauh sebelum ia masuk ke dalam lingkaran keluarga besar Sumitro.

Kekaguman itu bukan tanpa alasan. Bayangkan, di tengah berkecamuknya Perang Dunia II pada 1942, Sumitro justru menulis disertasi tentang kredit pedesaan di masa depresi ekonomi. Dari karya itu terlihat jelas bahwa ia bukanlah penganut neoliberalisme. Kaum neolib percaya pasar bisa mengatur dirinya sendiri dengan *supply* dan *demand* yang otomatis menemukan keseimbangan. Sementara, Sumitro



foto:
ANRI,
KEMPEN RI
DKI JAKARTA
12 Agustus
1955

Wakil Presiden Moh. Hatta (tampak belakang) menyampaikan sambutan pada pelantikan Menteri Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap di Istana Negara. Tampak dari kanan ke kiri: Menteri Agama Mohammad Iljas, Menteri Sosial Sudibjo, Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana, Menteri Muda Perhubungan Asraruddin, Menteri Perhubungan Frits Laoh, Menteri Perekonomian Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono, Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo.

berbicara tentang kemiskinan, depresi, dan jurang kaya-miskin yang lahir dari warisan kolonial.

“Prof. Sumitro adalah sosialis, nasionalis, sekaligus patriot. Ia mungkin sempat tak sejalan dengan Bung Karno, tapi setiap kali negara memanggil, ia selalu kembali untuk mengabdikan,” tutur Sudrajad.

Pengaruh Pemikiran Keynes

Menurut Sudrajad, pemikiran Sumitro banyak dipengaruhi oleh John Maynard Keynes, ekonom besar yang menggugat mitos “*Invisible Hand*”. Krisis 1930-an menjadi bukti nyata bahwa pasar tidak selalu bisa menyelamatkan diri

sendiri, karena tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian justru bisa runtuh. Dari sanalah Sumitro menarik pelajaran penting.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang baru merdeka, dengan ketidakmerataan pendapatan begitu lebar, ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir, bukan untuk mendominasi, bukan untuk menguasai, melainkan sebagai wasit yang memastikan jalannya permainan tetap adil.

Sudrajad juga menepis anggapan bahwa teknokrat para pendahulunya berhaluan neolib. Ia menegaskan, justru sebaliknya, banyak karya dan kebijakan mereka menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam pembangunan.

Ia mencontohkan, Widjojo Nitisastro misalnya, pernah menulis disertasi tentang ledakan penduduk dan



Pencerahan Mr.Sumitro dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) tentang sosialisme di hadapan mahasiswa di Gedung SMA Jl. Diponegoro.

foto:
KEMPEN RI
DKI JAKARTA
1950

kemiskinan parah di Jawa. Dari kajian itu lahirlah program transmigrasi, sebuah langkah besar negara untuk mengatasi kesenjangan demografis.

Ali Wardhana, di sisi lain, banyak belajar dari krisis Amerika Latin. Ia menyadari pentingnya intervensi negara untuk mencegah ketegangan sosial yang bisa meledak sewaktu-waktu. Sementara itu, Emil Salim menulis disertasi tentang perencanaan nasional di Mesir, yang memperkuat keyakinannya bahwa peran negara sangat vital agar perekonomian negara tidak kacau.

“Kalau neolib percaya penuh pada mekanisme pasar, mana mungkin ada program besar-besaran memindahkan jutaan orang dari Jawa ke Lampung atau Deli? Itu jelas kerja pemerintah, bukan pasar,” tuturnya lagi.

Pandangan Sudrajat sejalan dengan berbagai kajian yang menyoroti pemikiran para ekonom Indonesia. Salah satunya datang dari Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya *Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme* (2017).

Dawam membahas pemikiran Sumitro sebagaimana tertuang dalam disertasinya tentang perkreditan rakyat pada masa depresi. Dawam menilai Sumitro sebagai sosialis sekaligus nasionalis dan seorang ideolog yang tetap pragmatis.

Dawam yang menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 1980-1988 melihat Sumitro sebagai pemikir yang sangat produktif. Sumitro rutin menulis artikel analisis kebijakan ekonomi dan keuangan. Ia juga menerbitkan buku-buku berkualitas, termasuk disertasinya yang memiliki nilai akademis tinggi.

Sumitro dan Sutan Sjahrir sama-sama aktif di Partai Sosialis Indonesia (PSI). Keduanya adalah sosialis. Sjahrir mewakili sosialisme internasionalis, sementara Sumitro mengedepankan sosialisme yang berpadu dengan nasionalisme antikolonial. Yang pasti, Sumitro bukanlah ekonom liberal yang menyerahkan segalanya pada mekanisme pasar bebas. Ia berprinsip negara harus hadir mengarahkan pembangunan dan melindungi kepentingan rakyat.

Perpaduan Sosialisme dan Nasionalisme

Kepada Thee Kian Wee dalam buku *Pelaku Berkisah*, yang merupakan terjemahan dari buku *Recollections: The Indonesian Economy 1950s-1990s*, Sumitro menyampaikan bahwa ia menggaungkan Program Benteng sebagai langkah untuk membangun kekuatan tandingan terhadap kepentingan Belanda. Itu adalah salah satu bentuk kehadiran negara.

“Saya merasa bahwa tugas saya yang besar adalah membantu para produsen kecil, ini adalah warisan dari pengalaman masa kecil saya, dan dari tesis saya mengenai kredit pedesaan,” ungkap Sumitro.

Sumitro ingin membantu petani berpindah ke kegiatan nonpertanian, baik berupa pengolahan, transportasi, dan sebagainya.

“Saya tidak percaya pada kebijakan semacam kuota dan restriksi kuantitatif, tetapi saya juga tidak percaya bisa menyerahkan segalanya kepada kekuatan pasar sebagaimana adanya. itu adalah resep terbaik untuk bunuh diri secara politik bagi rezim manapun,” lanjutnya.

Menurutnya, tanpa melakukan usaha di bidang pendidikan, pelatihan, bimbingan kejuruan, koperasi, dan menguatkan daya tawar mereka, produsen kecil akan tetap miskin. Pemikiran ini sudah ada di kepala Sumitro sejak tahun 1930-an.

Sebagai seorang ideolog, Sumitro punya corak pemikiran yang khas. Ia memang berpikir dengan kerangka sosialisme, tetapi tidak berhenti di sana. Ia juga seorang nasionalis yang kuat sekaligus teknokrat pembangunan yang pragmatis. Menurut Dawam Rahardjo, identitas ganda ini terkadang tampak berlawanan, namun justru memperlihatkan keluasan cara pandang Sumitro.

Sebagai seorang ideolog, Sumitro punya corak pemikiran yang khas. Ia memang berpikir dengan kerangka sosialisme, tetapi tidak berhenti di sana. Ia juga seorang nasionalis yang kuat sekaligus teknokrat pembangunan yang pragmatis.

Sebagai seorang sosialis, Sumitro bahkan sempat terpilih menjadi Ketua PSI pada kongres tahun 1951. Namun, keputusan itu dibatalkan oleh Sutan Sjahrir, pendiri PSI yang waktu itu tidak hadir. Akhirnya, kursi ketua tetap kembali dipegang oleh Sjahrir.

Jika Sjahrir dikenal sebagai sosialis sekaligus internasionalis, Sumitro menempuh corak yang sedikit berbeda, yaitu sosialis yang berpadu dengan nasionalisme antikelonial dan sentuhan humanisme. Dawam bahkan menyamakan fenomena ini dengan Amartya Sen, ekonom besar India yang juga dikenal memiliki “identitas ganda”, yaitu memadukan identitas sosialisme, humanisme, dan nasionalisme.

Latar belakang Indonesia sebagai *plural society* turut membentuk cara berpikir Sumitro. Ia tumbuh dalam pusaran pengaruh berbagai peradaban, yaitu Hindu-Buddha, Islam, Konghucu, hingga modernitas Eropa dan Amerika. Dari situ, ia menyerap berbagai perspektif tetapi tetap berpijak pada tujuan utama membangun bangsa.

Sebagai seorang ideolog, Sumitro punya corak pemikiran yang khas. Ia memang berpikir dengan kerangka sosialisme, tetapi tidak berhenti di sana. Ia juga seorang nasionalis yang kuat sekaligus teknokrat pembangunan yang pragmatis.

Sumitro bukanlah sosialis marxis seperti Sjahrir. Ia antikomunis, dan lebih dekat dengan sosialisme ilmiah ala Friedrich Engels, jauh dari kecenderungan sosialis utopis. Disertasinya pada tahun 1942, *Het Volkcredietwezen in de Depressie*, membahas kredit rakyat miskin, menjadi suatu arah pemikiran yang sangat konkret dan aplikatif.

Perjalanan intelektualnya berlanjut ketika ia mengajar di Universitas Indonesia dan bekerja di PBB. Pada masa itu, ia mendirikan *Jakarta School of Economics* yang terinspirasi oleh Sosialisme Fabian di Inggris, gerakan yang melahirkan Partai Buruh dan London School of Economics (LSE). Sumitro bahkan berencana mengirim murid-muridnya, seperti Widjojo Nitisastro, untuk belajar di LSE agar mendapat wawasan sosialis modern. Sayangnya, Inggris tidak memberi beasiswa, sehingga para muridnya akhirnya berlabuh ke Universitas California, Berkeley.

Dari sinilah terlihat jelas bahwa Sumitro memadukan sosialisme, nasionalisme, dan pragmatisme dalam kerangka pembangunan. Berbeda dengan di Timur Tengah di mana kombinasi serupa justru melahirkan fasisme militer, Sumitro mengarahkannya pada ilmu pengetahuan sosial, politik, dan ekonomi pembangunan.

Pemikiran tersebut terekam dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan* (1954) yang membuatnya dijuluki “Begawan Ekonomi Indonesia” sekaligus “Bapak Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia”. Dalam pandangannya, pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan rakyat, mulai dari perkreditan, perdagangan, industrialisasi, hingga strategi keluar dari resesi.

Tak heran jika Herbert Feith menyebut Sumitro sebagai intelektual dengan kecakapan politik luar biasa, sementara Robert Heilbroner menggambarkannya sebagai ekonom radikal namun tetap nasionalis.

Keterbukaan terhadap Kolaborasi Internasional

Bagi Sumitro, modal asing bukan ancaman jika dikelola dengan tepat, melainkan menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, saat menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada awal 1950-an, ia pun mendorong masuknya modal asing sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional.

Pandangannya sederhana, Indonesia yang baru merdeka memerlukan suntikan modal untuk menggerakkan roda ekonomi, dan salah satu sumbernya bisa berasal dari luar negeri. Meski begitu, dukungan tersebut tidak berarti tanpa batas. Sumitro tegas menyatakan bahwa sektor industri vital harus tetap berada di bawah kendali nasional.

Dia tidak ingin modal asing mendikte arah pembangunan atau menguasai sumber daya strategis. Menurut prinsipnya, investasi luar negeri adalah alat, bukan jalan untuk menyerahkan kedaulatan ekonomi pada pihak asing.

Baginya, modal asing bisa menjadi pemicu tumbuhnya modal domestik. Pemikiran ini terlihat dalam Program Benteng, ketika ia memberi peluang monopoli impor bagi koperasi pribumi untuk memperkuat basis ekonomi nasional, sambil tetap membuka akses pasar internasional.

Jika Sumitro menekankan perlunya kebijakan untuk memperkuat ekonomi domestik, Sudrajad Djiwandono melihat gagasan serupa dalam konteks ketahanan pangan melalui Program Benteng sebagai negara agraris.

“Konsep lumbung padi atau stok beras yang saat ini dijalankan Bulog sebenarnya menjadi benteng utama ketahanan pangan. Namun, yang sering luput disadari adalah semakin besar stok yang terkumpul, semakin tinggi pula tantangan yang menyertainya, ibarat ada gula ada semut,” jelasnya.

Pandangan ini kian relevan di tengah dinamika industri global, di mana ketahanan pasokan sangat rentan terhadap gejolak internasional. Misalnya, konflik di wilayah Timur Tengah yang membuat jalur laut di kawasan sempit menjadi rawan. Kapal-kapal harus memutar lebih jauh hingga dua minggu. Akibatnya, biaya logistik melonjak dan harga jual ke Indonesia bisa naik hingga 25 persen. Situasi ini menjadi pengingat bahwa meskipun *supply chain* modern sudah tertata, gangguan bisa terjadi kapan saja. Karena itu, lumbung pangan atau benteng cadangan tetap mutlak dibutuhkan agar pasokan dalam negeri terjaga.

Dari pengalaman tersebut, Sudrajad memperluas pandangannya pada peran Indonesia di kancah internasional, khususnya melalui keanggotaannya

dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Awalnya ia sempat ragu karena negara-negara anggotanya dianggap terlalu jauh. Namun, setelah melihat kehadiran China, India, dan Rusia, ia menilai keanggotaan ini justru strategis.

“Pengalaman pahit ketika India tiba-tiba menghentikan ekspor beras ke Indonesia menjadi pelajaran penting. Kini, dengan adanya BRICS, Indonesia memiliki opsi alternatif dari negara anggota lain bila terjadi gangguan pasokan, sehingga ketahanan pangan lebih terjamin,” ungkapnya.

Pandangan ini diperkuat Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden Urusan Energi. Menurutny, Sumitro percaya pada peran negara dan perencanaan ekonomi jangka panjang, tetapi bersikap pragmatis terhadap investasi asing maupun kerja sama internasional selama tetap berada dalam kerangka kemandirian nasional. Dalam buku *Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme* (2017) karya Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Purnomo menyampaikan bahwa Sumitro mewakili tipe ekonom teknokrat nasionalis moderat, bukan sosialis radikal. Ia juga bukan penganut pasar bebas ekstrem atau neoliberal.

Dalam kerangka pikir Sumitro, investasi asing adalah salah satu pilar pembangunan, berdampingan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Tiga unsur ini, menurutnya, harus berjalan beriringan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat.

Dengan demikian, meski berpijak pada kemandirian nasional, Sumitro tidak pernah menutup pintu bagi modal asing. Selama diarahkan untuk memperkuat, bukan menggantikan kekuatan ekonomi bangsa, investasi asing justru menjadi mitra strategis dalam membangun Indonesia. (Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Uang Rupiah yang ditandatangani oleh Sumitro Djojohadikusumo terbit antara 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953, pada masa ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Uang seri ini dikenal sebagai seri pemandangan, menampilkan gambar alam Indonesia serta menjadi seri pertama yang memuat lambang Garuda Pancasila.

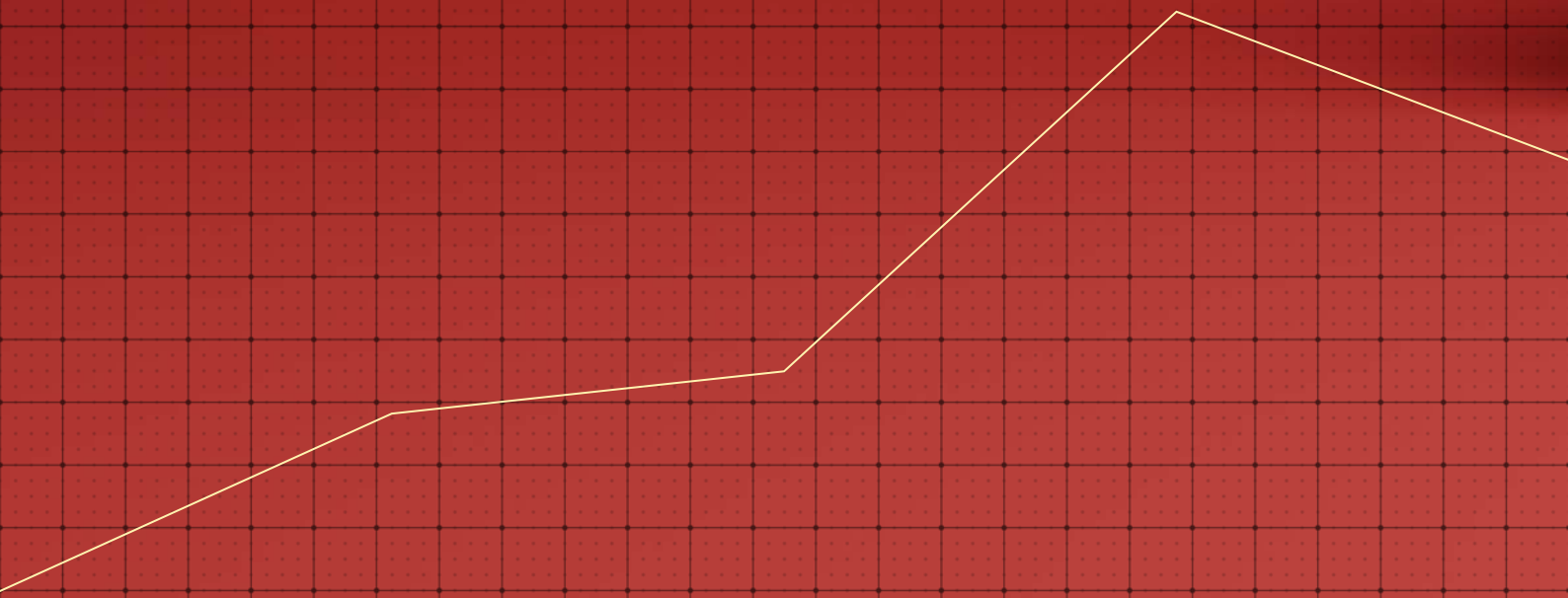


foto:
Sumitro
Institute



**desain
ilustrasi:**
Biro KLI,
Kemenkeu

Ekonom Muda yang Lantang *di Panggung Dunia*

“Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya.” – Sumitro Djojohadikusumo

Kegelisahan menyelimuti Sumitro Djojohadikusumo saat duduk di meja Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Sebagai ketua komisi ekonomi-keuangan, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa Indonesia dibebani utang kolonial sebesar miliaran gulden, termasuk biaya agresi militer Belanda yang justru telah menelan korban di tanah air.

Bagi Sumitro, logika keputusan itu terasa terbalik. Seharusnya Belanda yang berutang pada Indonesia, bukan sebaliknya. Namun demi penyerahan kedaulatan yang sudah di depan mata, keputusan berat itu akhirnya terpaksa diterima.

“Kekurangan dolar yang bertahun-tahun diderita oleh Negeri Belanda telah diperkecil atau melahan ditutup dengan pendapatan dari tanah jajahannya, yaitu dengan bunga atas penanaman modal dan pembayaran uang setoran kepada maskapai yang beranak cabang di Indonesia,” terang Sumitro kepada rekan-rekannya sesama delegasi Indonesia di KMB.

Kekecewaan Sumitro kian dalam ketika perjuangannya menjadikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral Republik gagal. Harapannya agar Indonesia punya lembaga keuangan yang lahir dari semangat nasional harus pupus, setelah De Javasche Bank (DJB), warisan kolonial Belanda, ditetapkan tetap sebagai bank sirkulasi. Bagi Sumitro, keputusan itu bukan sekadar soal kelembagaan, melainkan simbol bertahannya cengkeraman kolonial atas ekonomi Indonesia.

Pada saat koleganya, Kolonel T.B. Simatupang, menuai kemenangan diplomatis di bidang militer dengan menjadikan tentara Republik sebagai Tentara Nasional Indonesia, Sumitro justru harus menelan frustrasi karena perjuangan ekonominya kandas.

“Seperti Simatupang menginginkan tentara Republik menjadi TNI, begitulah saya menginginkan BNI menjadi bank sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Saya merasa, itu adalah bank kita,” ujarnya.

Negosiasi Berat di Den Haag

Pertemuan bersejarah itu berlangsung di Parlemen Belanda, Binnenhof Den Haag, tepatnya di Ridderzaal Tweede Kamer. Tiga pihak hadir di sana: delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan golongan federal yang tergabung dalam BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*). Dari pihak Indonesia hadir tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, Dr. J. Leimana, Kolonel T.B. Simatupang, hingga Ali Sastroamidjojo. Berhadapan dengan Belanda, delegasi Republik dan BFO tampil kompak dan bersatu.

KMB yang dimulai sejak 23 Agustus 1949 berlangsung alot dan berlarut-larut. Salah satu isu terberat adalah soal utang kolonial. Belanda bersikeras Indonesia harus membayar utang sejak masa Hindia Belanda hingga 1949. Indonesia menolak, dan hanya bersedia menanggung beban utang sampai Maret 1949, yaitu masa berakhirnya Hindia Belanda.

Setelah perdebatan panjang, akhirnya pada 24 Oktober 1949 disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia juga dibebani pembayaran utang perang sebesar 1,13 miliar dolar AS. Menurut Rosihan Anwar dalam *Napak Tilas ke Belanda: 60 Tahun Perjalanan Wartawan KMB 1949*, Belanda sempat menuduh Indonesia menanggung utang hingga 4.100 juta gulden. Namun menurut

perhitungan Sumitro, justru Belanda yang berutang kepada Indonesia lebih dari 500 juta gulden.

Kesepakatan ekonomi tersebut dituangkan dalam *Financial-Economic Agreement*. Menurut catatan Prof. Dr. Boediono dalam buku *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah* (2016), poin-poin penting perjanjian tersebut antara lain:

1. Semua perusahaan Belanda boleh beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan transfer keuntungan.
2. Utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS menjadi tanggungan Indonesia.
3. Dalam kebijakan tertentu, Indonesia harus berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan Belanda.
4. Pemerintah Indonesia wajib menanggung biaya 17 ribu karyawan eks Belanda selama dua tahun serta menampung 26 ribu mantan tentara KNIL.

Sebagai imbalannya, Indonesia tidak diwajibkan memberikan jaminan khusus untuk pembayaran utang tersebut.

Namun demikian, sikap Belanda menunjukkan mereka masih enggan sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Butuh waktu lebih dari setengah abad sampai akhirnya ada perwakilan resmi Belanda hadir dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Pada 2005, Menteri Luar Negeri Bernard Bot, bukan ratu atau perdana Menteri Belanda, datang dan menyampaikan pidato yang lebih bernuansa diplomatis ketimbang permintaan maaf.

“Kenangan datang pada hari ini, baik positif maupun negatif dari Indonesia,



Sidang Umum PBB, Lake Success, AS. Baris depan: Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, dan seorang delegasi asing. Di belakang Sjahrir (kiri–kanan): Soedjatmoko, Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, dan Dr. P. Piliat (Menteri dari India).

foto:
ANRI

melintasi lima zona waktu dan berjarak 28.000 kilometer jauhnya dari tempat ini, tetapi belum begitu dekat secara emosional,” ujarnya dalam pidato tersebut.

Pidato itu menjadi tanda bahwa luka sejarah belum sepenuhnya pulih. Meski begitu, perjuangan diplomasi pada masa awal kemerdekaan dengan tokoh-tokoh seperti Sumitro di garis depan, membuktikan bahwa Indonesia mampu memperjuangkan kedaulatannya. Tidak hanya lewat senjata, tetapi juga lewat kata-kata lantang yang menggema hingga ke ruang rapat PBB dan halaman surat kabar dunia

Diplomat Muda yang Cerdas Nan Lincah

Terlepas dari kisah di Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, nama Sumitro Djojohadikusumo lebih sering diingat

sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Namun jauh sebelum itu, ia juga sudah menorehkan jejak di panggung dunia sebagai diplomat muda yang lantang membela kemerdekaan Indonesia.

Bagi Sumitro, perjuangan bisa dilakukan melalui jalur kecerdasan dan keberanian di medan diplomasi. Dari ruang rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga meja perundingan dengan Belanda, Sumitro tampil sebagai sosok yang tak gentar memperjuangkan kedaulatan bangsa.

Perjalanan itu bermula setelah Perang Dunia II berakhir. Saat itu, Sumitro masih bekerja di lembaga riset *Nederlandsche Economische Hogeschool* di Belanda, Sumitro mendapat kesempatan langka dengan diajak bergabung sebagai penasihat ahli dalam delegasi Belanda ke Dewan Keamanan PBB di London pada awal

1946. Kesempatan ini justru membuka jalan baginya untuk mengenal langsung dinamika diplomasi internasional.

Tak berhenti di situ, secara formal Sumitro juga ditugaskan sebagai delegasi pengamat Indonesia untuk PBB, dengan jabatan wakil kepala misi sekaligus menteri berkuasa penuh untuk urusan ekonomi. Dalam forum internasional itu ia terlibat dalam pembahasan isu-isu besar, mulai dari energi atom hingga kondisi politik di Indonesia. Salah satunya menyangkut pelaksanaan Resolusi 67 mengenai situasi di Nusantara.

Bagi Belanda, kehadiran Sumitro di forum internasional itu mungkin hanya dimaksudkan sebagai “pemanis,” sekadar memberi kesan seolah mereka bersedia melibatkan orang Indonesia. Namun, Sumitro justru menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran berharga. Sumitro

cepat membaca situasi bahwa isu kemerdekaan Indonesia tidak mendapat perhatian serius. Kecewa, ia memilih kembali ke tanah air. Setibanya di Jakarta, ia langsung bergabung dengan pemerintahan Sutan Sjahrir dan mulai aktif di Kementerian Keuangan, mengerahkan ilmunya untuk republik muda.

Tak lama berselang, Sumitro kembali terjun dalam diplomasi global. Pada 12 Agustus 1947, ia ikut serta dalam delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama tokoh besar seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Charles Tambu. Saat itu, untuk pertama kalinya Republik Indonesia mendapat undangan duduk di meja Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York, guna membahas apa yang disebut “Indonesian Question”, konflik antara Indonesia dan Belanda setelah pecahnya Agresi Militer I.

Misi delegasi Indonesia jelas, yaitu menghentikan agresi Belanda dan menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan. Sebagai ekonom muda, Sumitro menyoroti juga dampak blokade Belanda yang melumpuhkan perdagangan dan membuat Indonesia butuh akses ke dunia luar agar bisa bertahan. Tak hanya soal politik, perjuangan diplomasi di PBB itu juga menyangkut ekonomi dan masa depan rakyat.

Dari perdebatan panjang lahir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata dan membuka jalan menuju perundingan Indonesia-Belanda. Meski tidak serta-merta menghentikan konflik, keputusan itu menjadi tonggak penting pengakuan dunia terhadap Republik Indonesia.



Delegasi Indonesia di PBB, Lake Success, Agustus 1947: Sutan Sjahrir disambut penyematan bunga, didampingi Soedjatmoko (paling kiri) dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

foto:
ANRI



Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur (no. 3 dari kanan) berjabat tangan dengan Wakil Penerangan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Olav Rytter (tengah) pada pertemuan perkenalan para menteri Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Korps Diplomatik di Kementerian Luar Negeri RI. Tampak dari kanan ke kiri: Menteri Pertanian Mohammad Sardjan, Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata (no. 4), Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo (no. 5), Menteri Luar Negeri Ida Anak Agung Gde Agung, dan Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
16 Agustus
1955

Pada periode yang sama, Sumitro dipercaya menjadi Komisaris Perdagangan Republik Indonesia di New York, kemudian diplomat di Kedutaan Besar RI di Washington D.C. Dari pos-pos inilah ia semakin matang belajar soal diplomasi ekonomi dan bagaimana membangun dukungan internasional bagi negeri muda yang masih berjuang.

Namun, puncak keberanian Sumitro muncul pada Desember 1948, saat Belanda meluncurkan Agresi Militer II. Kala itu ia menjabat sebagai *Acting Head of the Indonesian Delegation to the UN*. Pada 21 Desember, ia menulis surat terbuka yang dimuat di *New York Times*. Surat itu menggema luas karena secara terbuka menyinggung penyalahgunaan bantuan Amerika oleh Belanda untuk menindas Indonesia, sekaligus mendesak agar Amerika Serikat menghentikan dukungan finansialnya.

Sumitro menulis dengan tajam: *"The present Dutch military campaign has most unfortunately brought into horrible realization apprehensions that*

were carried for some time in the minds of all well-meaning people. There is no other alternative for the Republic of Indonesia than to lead its own life and carry on to the best of its abilities as a separate independent and sovereign state. We respectfully but urgently request the United States Government to discontinue rendering American dollars to the Netherlands under the European Recovery Program or otherwise."

"Kampanye militer Belanda saat ini, sayangnya, telah mewujudkan secara tragis kekhawatiran yang selama ini tersimpan dalam benak semua pihak yang beritikad baik. Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

“Kampanye militer Belanda saat ini, sayangnya, telah mewujudkan secara tragis kekhawatiran yang selama ini tersimpan dalam benak semua pihak yang beritikad baik. Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Dengan penuh hormat namun mendesak, kami memohon kepada Pemerintah Amerika Serikat agar menghentikan pemberian bantuan dalam bentuk dolar Amerika kepada Belanda, baik melalui Program Pemulihan Eropa maupun dalam bentuk lainnya.”

sepenuhnya. Dengan penuh hormat namun mendesak, kami memohon kepada Pemerintah Amerika Serikat agar menghentikan pemberian bantuan dalam bentuk dolar Amerika kepada Belanda, baik melalui Program Pemulihan Eropa maupun dalam bentuk lainnya.”

Surat itu bukan sekadar opini pribadi. Bagi Sumitro, ini strategi cerdas dengan memanfaatkan pers untuk menggugah opini publik Amerika agar

ikut menekan pemerintahnya. Ia tahu betul bahwa diplomasi tak hanya berlangsung di ruang rapat, tetapi juga di halaman surat kabar yang dibaca dunia.

Melalui langkah itu, Sumitro menunjukkan dirinya sebagai diplomat yang memahami medan politik global. Ia mampu memadukan analisis ekonomi, kepekaan politik, dan pemahaman terhadap opini publik internasional menjadi satu strategi yang efektif bagi perjuangan diplomasi Indonesia. Kiprahnya di panggung dunia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. *(Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)*

Guru, Sahabat, dan Teladan *di* *Mata Orang* *Terdekat*

“Jangan menanyakan ‘what can I get.’ Jangan sampai kita menuntut pengakuan. Kerja untuk masyarakat, itu saja.” – Sumitro Djojohadikusumo

Nama Sumitro Djojohadikusumo selalu lekat dengan fondasi pemikiran ekonomi Indonesia. Di mata para ekonom dan pejabat publik, ia adalah sosok pemikir besar yang memadukan filsafat, strategi, dan keberpihakan terhadap rakyat. Pemikirannya masih menjadi rujukan, baik di forum akademis maupun dalam praktik pembangunan nasional hingga hari ini.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, pernah bekerja langsung bersama Sumitro di Center for Policy Studies (CPS)—lembaga pemikir yang ia dirikan. Sumitro akrab dipanggil Pak Cum oleh rekan-rekannya.

Anggito masih ingat betul bagaimana setiap pertemuan bersama Sumitro tak pernah sekadar membahas data atau grafik.

“Beliau selalu memulai dengan gambaran besar ekonomi nasional. Pidatonya bukan sekadar teknis, melainkan menembus prinsip dasar dari fungsi negara, peran koperasi, hingga arah deregulasi. Semuanya demi kesejahteraan rakyat,” ujar Anggito saat *soft launching* Sumitro Institute dan diskusi

Soedradjad Djiwandono saat diwawancarai oleh Kompas, 2 Oktober 2025.

foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

bertema *Prolong Sumitronomics: Pembangunan untuk Ekonomi dan Ekonomi untuk Pembangunan*.

Kesaksian itu sejalan dengan pengalaman Soedradjad Djiwandono, menantu sekaligus ekonom yang pernah menjadi asisten Sumitro saat menjabat Menteri Perdagangan.

“Bagi saya, beliau pendidik sejati, baik di ruang kuliah, kabinet, maupun meja makan. Hampir semua rapat beliau ajak, saya ikut. Dari situ saya belajar bagaimana merumuskan kebijakan secara jernih. Tapi, yang paling melekat adalah ajarannya, bekerja untuk masyarakat tanpa pamrih, jangan pernah menuntut pengakuan,” kenang Soedradjad.

Ayah dan Opa yang Sederhana

Meski publik mengenalnya sebagai begawan ekonomi, bagi keluarga, Sumitro tetaplah seorang ayah dan kakek yang penuh perhatian.

“Saya memanggil beliau, Opa. Sebagai cucu pertama, hubungan kami sangat dekat. Banyak orang mengenangnya sebagai ekonom, menteri, atau tokoh nasional. Tapi, Opa ingin dikenang bukan hanya karena jabatannya, melainkan sebagai pengajar. Itu hal yang jarang diketahui publik,” ujar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, cucu pertama Sumitro.

Sejak muda, bahkan ketika menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih gelar PhD dari Rotterdam School of Economics, *passion* Sumitro



adalah mengajar. Baginya, ilmu harus dibagikan, bukan disimpan. Ia menjadi salah satu pendiri Jakarta School of Economics cikal bakal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan membimbing murid-murid yang kemudian menjadi tokoh nasional, seperti Widjojo Nitisastro hingga Emil Salim.

Di mata kedua putrinya, Bianti dan Maryani Djojohadikusumo, sosok sang ayah jauh lebih sederhana daripada yang terlihat di panggung publik.

“Sebenarnya waktu itu kami masih kecil, jadi tidak terlalu paham kalau beliau pejabat atau profesor. Bagi kami, jabatan itu hanya pekerjaan. Ayah juga sederhana—sering nyetir sendiri, padahal ada sopir. Di rumah, beliau ya ayah kami,” kenang Maryani.

Kebersamaan keluarga terasa setiap Minggu. Sumitro selalu meluangkan waktu, meski sibuk dengan jabatan negara.

“Hari Minggu selalu ada kebiasaan makan bersama atau jalan-jalan sesuai keinginan anak-anak. Saya suka minta makan es krim, Maryani lebih suka



**Foto Keluarga (urutan dari kiri ke kanan):
Prabowo Subianto, Dora Sigar, Maryani
Lemaistre, Biantiningsih Djiwandono, Sumitro
Djojohadikusumo, Hashim Sujono.**

foto:
Dokumentasi
Keluarga

ke Kemayoran lihat pesawat, sedangkan Prabowo biasanya ke kebun binatang. Jadi tiap minggu, Ayah bertanya: ‘*Mau ke mana minggu ini?*’ dan semua ikut,” tambah Bianti sambil tersenyum.

Meja Makan, Ruang Hangat untuk Cerita dan Kebersamaan

Sumitro menikah dengan Dora Sigar dan dianugerahi empat anak, yakni Biantiningsih Djiwandono, Maryani Lemaistre, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, dan Hashim Sujono Djojohadikusumo. Besarnya pengaruh sang ayah tak bisa dilepaskan dari peran ibu mereka, Dora Sigar, yang praktis membesarkan anak-anak ketika Sumitro harus berpindah-pindah karena pengasingan.

“Dari ibu, kami belajar disiplin, sopan santun, dan kemandirian. Karena Ayah sering berpindah, praktis Ibu yang banyak membesarkan kami, seperti *single mother*. Itu sangat membentuk karakter kami,” ungkap Maryani.

Bianti menambahkan pesan ibunya yang terus melekat.

“Ibu selalu menekankan pentingnya pendidikan, terutama untuk perempuan. Pesannya jelas, ‘*Kalian perempuan harus sekolah setinggi mungkin supaya bisa mandiri. Jangan bergantung pada suami.*’ Itu saya dengar sejak umur 12 tahun, dan sampai sekarang saya turunkan ke anak-cucu,” terangnya.

Meski dikenal serius di panggung publik, di rumah Sumitro justru menghadirkan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

“Nasi goreng itu makanan favorit Ayah sampai turun ke anak-cucu. Sangat sederhana, tidak pernah menuntut. Kami diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada, tidak boleh mengeluh soal makanan,” kenang Maryani dan Bianti.

Bagi keluarga, meja makan adalah ruang penting yang bukan sekadar untuk mengisi perut, tetapi juga sarana berbagi cerita dan berdiskusi.

“Kami selalu duduk makan bersama, tidak seperti banyak keluarga lain yang makan sendiri-sendiri. Dari situ kami belajar berbagi cerita, berdiskusi. Topiknya bisa ringan sampai serius, politik, sejarah, budaya. Dan Ayah selalu memberi ruang untuk anak-anak menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dengan beliau,” ujar Maryani.

Bianti menambahkan, tradisi itu melatih mereka untuk berpikir kritis.

“Kalau kami tidak setuju, boleh saja, asal bisa menjelaskan alasannya. Ayah tidak pernah marah karena berbeda pendapat, malah meluruskan kalau kami salah. Tidak pernah ada larangan ‘*anak kecil tidak boleh bicara.*’ Itu membentuk kami terbiasa berpendapat,” jelasnya.

Meski penuh kasih, Sumitro tetap tegas sebagai ayah.

“Tentu, beliau sering marah, terutama pada anak laki-laki karena lebih nakal. Prabowo dulu sering bikin ayah jengkel, sedangkan Hashim lebih keras kepala soal makanan. Tapi anak-anak perempuan jarang dimarahi,” cerita Bianti sambil tertawa.

Kedekatan juga berlanjut hingga ke generasi cucu.

“Cucu pertama, Tommy (Thomas Djiwandono), sangat dekat dengan beliau. Selama sembilan tahun, dia satu-satunya cucu. Jadi kemana-

mana dibawa, bahkan ikut duduk di meja makan orang dewasa. Dari situ, sejak kecil Tommy terbiasa dengan pembicaraan serius tentang politik, budaya, sejarah, seperti yang dulu kami alami,” kenang Maryani.

“Bahkan ada istilah ‘*Dewan Cucu*’ di keluarga. Ayah selalu mengajak cucu-cucunya sebulan sekali untuk makan di restoran, pergi ke toko buku atau toko mainan, atau sekadar diberi *angpao*. Itu cara beliau menjaga kedekatan dengan generasi berikutnya,” tambah Bianti.

Dari sisi Soedradjad Djiwandono sebagai menantu, menurutnya makan malam keluarga selalu terasa seperti “seminar kecil”. Selalu penuh diskusi soal ekonomi, politik, hingga filsafat hidup.

“Beliau pada dasarnya pendidik, jadi kebiasaan itu muncul alami di keluarga. Suasana hangat, tapi substansinya dalam,” ujar Soedradjad.

Warisan Sejati: Nilai Hidup yang Melampaui Teori Ekonomi

Thomas mengakui bahwa minatnya pada bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh sang opa, meskipun perjalanan karirnya sempat berliku, mulai dari menjadi wartawan hingga bekerja di bidang lain.

“Landasan berpikir saya banyak berasal dari beliau. Opa selalu menekankan pentingnya berpikir luas dan memahami konteks sebelum mengambil keputusan,” ujar Thomas.

Dari perjalanan panjangnya, ada dua nilai yang selalu ditekankan Sumitro: *human dignity* (martabat manusia) dan *social justice* (keadilan sosial).

“Martabat manusia berarti kehidupan yang layak, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga dalam aspek



Sumitro Djojohadikusumo menggendong cucu pertamanya, Thomas Djiwandono.

foto:
Dokumentasi
Keluarga

sosial, agama, kesehatan, pendidikan, hingga kebebasan. Sedangkan keadilan sosial berarti memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Nilai ini bukan teori bagi Opa, melainkan panggilan jiwa,” tutur Thomas.

Dari semua pengalaman, ada nilai-nilai yang terus diwariskan. Maryani menekankan tentang tanggung jawab dalam setiap keputusan.

“Ayah selalu mengajarkan, orang tua atau teman bisa memberi masukan, tapi keputusan tetap harus kita ambil sendiri, dengan segala konsekuensi,” tandasnya.

Sedangkan Bianti mengingatkan ajaran ayahnya tentang keteguhan hati. Jika harus menggambarkan sosok Sumitro dengan tiga kata, Maryani dan Bianti sepakat yaitu kejujuran, kesederhanaan, dan cinta tanah air adalah hal yang selalu lekat dengan beliau.

“*Always hope for the best but prepare for the worst*. Hidup penuh siklus, tapi itu bukan berarti selesai. Yang penting tetap rendah hati,” imbuhnya.

Setelah Panggung Publik, Tetap Mengabdikan Lewat Pemikiran

Setelah pensiun dari pemerintahan, Sumitro tetap aktif berbagi pemikiran. Ia menaruh perhatian besar pada koperasi sebagai sarana memperkuat masyarakat dari bawah. Baginya, tidak ada satu sistem ekonomi yang bisa diimpor mentah-mentah. Semuanya harus disesuaikan dengan sejarah dan filosofi Indonesia.

Di keluarga, Sumitro dikenal memegang teguh prinsip *noblesse oblige*, jika seseorang memiliki kemampuan atau posisi lebih tinggi, itu adalah kewajiban untuk membantu yang kurang mampu. Prinsip ini ia warisi dari ayahnya, Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia.

Soedradjad Djiwandono, mengenang bahwa prinsip itu selalu tampak dalam keseharian.

“Pak Mitro selalu bilang, selama kita kerja di pemerintahan harus tanpa pamrih, jangan menanyakan ‘*what can I get.*’ Jangan sampai kita menuntut pengakuan. Kerja untuk masyarakat, itu saja. Itu ajaran yang selalu beliau tekankan, dan menjadi aset berharga bagi kami,” tutur Soedradjad.

Setelah pensiun dari pemerintahan, Sumitro tidak berhenti mengabdikan. Ia tetap mengajar, menulis, bahkan masih sempat mengedit naskah buku Soedradjad di akhir hayatnya.

“Itu sudah menjadi darah dagingnya. Seorang pendidik seumur hidup,” ujar Soedradjad.

Bagi Soedradjad, Sumitro bukan hanya mertua, tapi panutan.

“Beliau *walk the talk*. Seorang nasionalis, patriotik, sekaligus humanis dalam arti yang sejati, selalu berpihak pada rakyat. Bahkan ketika berbeda pandangan dengan penguasa, beliau tetap memegang integritas,” pungkasnya.

Soedradjad menyampaikan bahwa wejangan paling berharga datang saat krisis 1998. Kala itu, ia tengah disorot



Keluarga Besar Sumitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar Djojohadikusumo (bersama anak, menantu, dan cucu).

foto:
Dokumentasi
Keluarga

“Opa bukan hanya kakek bagi saya. Beliau juga guru kehidupan. Beliau mengajarkan kesederhanaan, kedisiplinan, dan rasa hormat pada ilmu.”

publik dan dielu-elukan mahasiswa setelah tidak lagi menjadi pejabat. Sumitro menegurnya dengan bijak agar jangan terlena dengan popularitas sesaat, karena bisa membawa bahaya.



Wamenkeu Thomas Djiwandono saat diwawancarai oleh Media Keuangan (MK+), 7 Agustus 2025.

foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

“Beliau hanya berkata ‘go’. Pergilah, lanjutkan jalan akademikmu. Dari situlah saya kemudian berangkat ke Harvard dan menemukan ruang aman untuk menulis serta mengajar,” kenang Soedradjad.

Mengajarkan Hidup dengan Keteladanan

Bagi Thomas, waktu yang ia habiskan bersama sang opa di masa tuanya adalah kenangan yang tak ternilai.

“Banyak sekali, apalagi setelah beliau pensiun. Saat itu, saya bisa lebih sering bersamanya. Opa bukan hanya kakek bagi saya. Beliau juga guru kehidupan. Beliau mengajarkan kesederhanaan, disiplin, dan rasa hormat pada ilmu,” kenang Thomas.

“Dari Opa, saya belajar bahwa kejayaan seseorang tidak diukur dari jabatan, melainkan dari seberapa besar arti yang ia berikan bagi hidup orang lain,” imbuhnya

Bagi Thomas dan seluruh keluarga, warisan Sumitro jauh melampaui teori-teori ekonomi yang ia tinggalkan. Lebih dari itu, Sumitro mewariskan nilai-nilai kemanusiaan yakni tentang pentingnya membangun bangsa dengan terlebih dahulu membangun manusianya. Dari ruang sidang kabinet hingga ruang tamu rumah keluarga, Sumitro tetaplah Sumitro, seorang pembelajar seumur hidup, pengajar yang setia, dan kakek yang penuh kasih.

Kenangan itu sejalan dengan yang disampaikan Maryani.

“Kami ini sebenarnya keluarga yang beruntung, *privileged*. Dari kecil sudah mendapat kesempatan pendidikan dan pengalaman luas. Dengan *privilege* itu, Ayah menanamkan kewajiban untuk mengembalikan apa yang diterima, tidak hanya kepada negara, tapi juga lingkungan sekitar. Itu yang selalu kami pegang sampai sekarang,” tutupnya.

(Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Sumitro Djojohadikusumo mendirikan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
pada 18 September 1950.

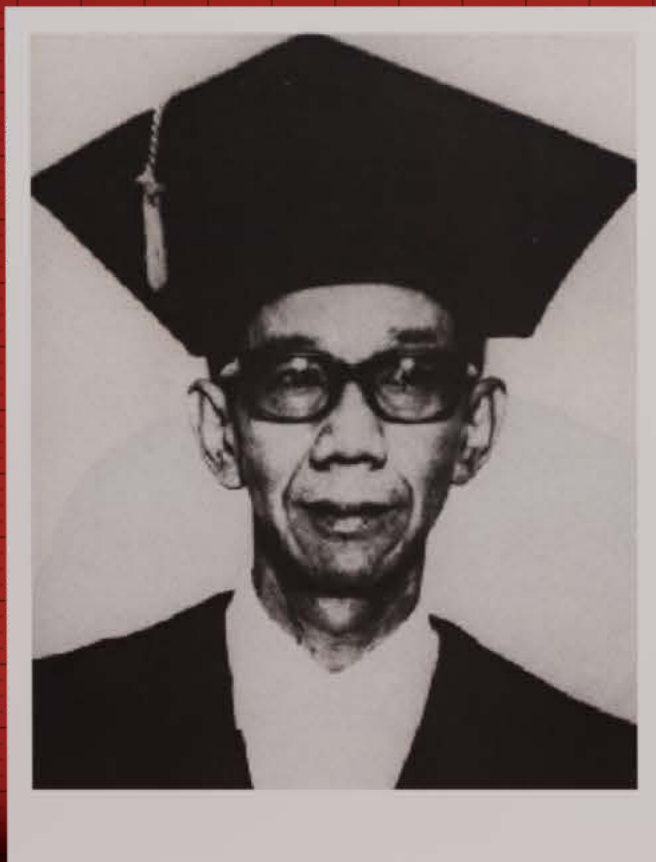


foto:
[https://feb.
ui.ac.id/
sejarah-feb-
ui/](https://feb.ui.ac.id/sejarah-feb-ui/)

Ia menjabat sebagai dekan fakultas tersebut pada periode 1951-1957.



desain
ilustrasi:
Biro KLI,
Kemenkeu

Antara Begawan Ekonomi *dan Guru Kehidupan*

*“Saya ini bukan arsitek kebijakan, hanya pengangkut bahan bangunan.” – **Sumitro Djojohadikusumo**.*

Julukan *Begawan Ekonomi* memang melekat pada nama Sumitro Djojohadikusumo. Namun bagi keluarga, sahabat, dan murid-muridnya, ia lebih dulu seorang ayah, kakek, guru, dan sahabat. Gelar itu tidak semata lahir dari reputasi akademik atau kiprah politiknya, tetapi juga dari cara ia menempatkan diri. Ia sederhana, penuh humor, dan selalu mengingatkan bahwa ekonomi sejatinya adalah tentang manusia.

Ia sering merendah, “Saya ini bukan arsitek kebijakan, hanya pengangkut bahan bangunan.”

Kalimat yang tampak ringan, tapi sesungguhnya sarat makna. Bentuk kerendahan hatinya yang tak ingin dikenang sebagai tokoh di puncak menara gading. Sumitro ingin orang mengenalnya sebagai seseorang yang menyiapkan jalan bagi generasi berikutnya.



Kesederhanaan yang Membentuk Karakter

Meski lahir dari keluarga priayi menengah pada masa Belanda, Sumitro tumbuh jauh dari kesan mewah. Saat kuliah di Rotterdam, hari-harinya lebih banyak dihabiskan di perpustakaan, larut dalam bacaan filsafat, sastra, dan politik. Ia mengagumi Malraux, Nietzsche, hingga Nehru, bahkan sempat mengikuti kuliah filsafat Henri Bergson di Sorbonne. Dari semua itu, pemikiran Andre Malraux-lah yang paling menancap dalam pikirannya.

Bagi Sumitro, Malraux lebih dari sekadar penulis besar. Malraux adalah seorang *man of action*, sosok yang gagasannya hidup dalam tindakan. Ia kerap mengutip salah satu kalimat Malraux dari pidatonya pada tahun 1935, di tengah bayang-bayang perang dunia.

“Peradaban tiada lain berarti mengabdikan kekuatan manusia pada pencapaian impiannya; bukanlah

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (kanan) bersama Prof. Dr. Slamet Iman Santoso (kiri), Elvianus Katoppo (kedua dari kiri), dan Margono Djojohadikusumo (keempat dari kiri) menyertai Bung Hatta, sesaat sebelum pembukaan acara Dies Natalis Universitas Indonesia pada tahun 1954.

foto:
Sumitro
Institute

menjadikan impian manusia sebagai abdi kekuatan,” pesan Malraux dalam pidato tersebut.

Bagi Sumitro muda, pesan itu adalah pengingat agar manusia jangan pernah kehilangan impian, sekalipun apapun keadaan. Kekuatan manusia, menurutnya, justru lahir dari keberanian menjaga asa dan ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat.

Renungan tersebut ia bawa dalam perjalanan panjangnya, mulai dari keterlibatannya di Partai Sosialis Indonesia, menyaksikan penderitaan



Menteri Keuangan Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan para hadirin sedang beramah-tamah setelah sidang selesai pada Konferensi Dinas Gabungan Kementerian-kementerian Penerangan, Keuangan, Pertanian dan Perekonomian di Kementerian Luar Negeri.

foto:
ANRI,
KEMPEN RI
JAKARTA
1952

rakyat desa, menghadapi krisis Eropa, hingga berjuang di masa-masa awal Republik Indonesia. Hidup membuatnya terbiasa dengan krisis. Ia tidak hanya *man of action*, tapi juga *man of crisis*. Sumitro selalu teguh dan berpihak pada rakyat kecil.

Ekonom dan Ketua Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), M. Dawam Rahardjo pernah menegaskan, “Warisan penting Sumitro bagi Indonesia adalah pemikirannya tentang bagaimana mengembangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.”

Ia mengutarakannya dalam acara mengenang 100 tahun Sumitro Djojohadikusumo pada 29 Mei 2017. Dawam juga mengenang kiprah Sumitro saat meluncurkan *Sistem Ekonomi Gerakan Benteng*, sebuah program yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini membuka jalan lahirnya para pengusaha pribumi yang bermodal lemah. Mereka perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menariknya, pilihan Sumitro untuk masuk ke jurusan ekonomi pun bukan keputusan yang penuh perhitungan.

“Saya sebetulnya tidak tertarik pada ilmu ekonomi, tapi saya ingin mengerti apa yang terjadi di negara saya sendiri dan di dunia. Jadi itu pilihan yang betul-betul serampangan karena saya lebih tertarik pada filsafat dan sastra,” ujarnya suatu ketika dalam wawancara dengan Dr. Thee Kian Wie.

Kesederhanaan itu ia bawa sampai menjabat menteri. Fasilitas berlebih sering ia tolak. Baginya, jabatan hanyalah alat, bukan tujuan. Ia percaya integritas dan pengabdian lebih bernilai daripada segala privilese.

Guru yang Membuka Mata Mahasiswa

Sebagai dosen, Sumitro Djojohadikusumo tidak hanya mengajar teori. Ia hadir sebagai sosok yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan keadaan, dan menemukan jawaban sendiri.

Di ruang kelas, ia kerap menantang mahasiswa dengan pertanyaan sederhana tapi tajam, “Apa sebenarnya inti dari masalah ini?”

Seringkali, jawaban pertama mahasiswa belum tepat. Tapi bukannya kecewa, Sumitro akan tersenyum dan membimbing mereka, hingga mereka menyadari sendiri kesalahan dan belajar mengartikulasikan pemikiran dengan lebih jernih.

Di sisi lain, baginya kemampuan teknis saja tidak cukup.

“Begitu banyak orang keliru menangani masalah. Atau lebih buruk lagi, mereka sama sekali tidak mengidentifikasi masalah. Mereka punya teknik, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya perlu diselesaikan,” ujar Sumitro.

Prinsip ini menjadi pedoman hidup yang ia tularkan dalam setiap diskusi santai di sela jam kuliah atau saat menegur mahasiswa yang terlalu cepat memberikan jawaban.

Ia juga peduli dengan masa depan murid-muridnya. Dialah yang pertama kali berani mengirim mahasiswa Indonesia belajar ke luar negeri, membuka jalan lahirnya generasi ekonom terkemuka.

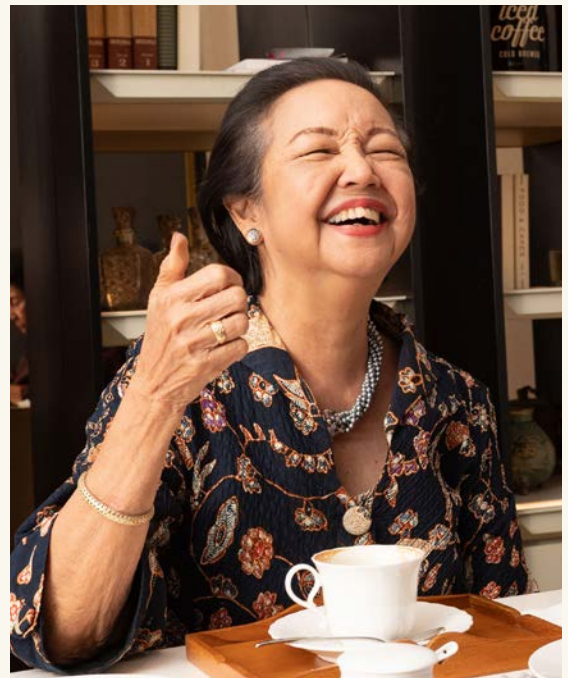
“Seorang guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga menyiapkan muridnya menghadapi dunia,” katanya.

Buku, Humor, dan Sahabat Lintas Benua

Di balik wajah tegasnya, Sumitro memiliki selera humor yang khas. Kedua putrinya, Biantiningsih dan Maryani, pernah bercerita bahwa ayah mereka gemar sekali bercanda, bahkan iseng melakukan “prank.” Suatu kali di sebuah hotel di Prancis, ia meminta pelayan menyajikan kopi Banyumas. Tentu saja sang pelayan bingung, tapi tetap mencatat pesanan seakan-akan kopi itu bisa dicari suatu saat.

Hobinya pada bacaan juga unik. Ia melahap karya Freud dan Jung, bahkan membaca teori-teori Schumpeter dan Frank Knight dalam bahasa aslinya. Schumpeter, yang menekankan pentingnya inovasi dan keberanian mengambil risiko, ia akui sangat memengaruhi cara pandangnya. Namun, ia juga suka menertawakan dirinya sendiri.

“Keynes? Saya pura-pura memahaminya,” katanya suatu kali sambil terkekeh, seolah menegaskan



Maryani Lemaistre, putri Sumitro Djojohadikusumo, saat diwawancarai oleh Kompas, 26 Agustus 2025.

foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

Biantiningsih Djiwandono, putri Sumitro Djojohadikusumo, saat diwawancarai oleh Kompas, 26 Agustus 2025.



foto:
Biro KLI,
Kemenkeu

bahwa bahkan seorang begawan ekonomi pun bisa kebingungan menghadapi buku yang rumit.

Namun di luar itu, ia tetap punya sisi ringan. Di rumah ia gemar bercerita tentang masa kecilnya di pedesaan, tentang paceklik, atau sekadar kisah kecil yang membuat keluarga tertawa. Sahabat-sahabat dekatnya juga datang

dari berbagai latar belakang. Ia akrab dengan ekonom seperti Walter Heller di Amerika, hingga Andreas Papandreou di Yunani, yang kelak menjadi Perdana Menteri. Pertemanan lintas batas itu menunjukkan betapa luas wawasannya, sekaligus betapa mudahnya ia menjalin hubungan personal.

Pandangan Visioner dan Kritik Tajam

Selain sisi pribadinya yang hangat, Sumitro Djojohadikusumo meninggalkan warisan pemikiran ekonomi yang tajam dan visioner. Dalam sambutannya yang berjudul *The Political Economy of Indonesia, Past, Present and Future*, ia menyoroti periode turbulensi yang sedang dialami Indonesia pada masanya.

“Meski demikian, kita telah berhasil mencegah terjadinya suatu *crash*,” ujarnya dengan nada tenang, menunjukkan ketajaman analisis sekaligus keyakinan pada kemampuan bangsa.

Menurut ekonom Stefan Supto Handoyo, kontribusi Sumitro sangat besar terutama di awal kemerdekaan.

“Keunikan Profesor Sumitro adalah bisa membaca situasi ekonomi makro pada saat itu dan bagaimana menerjemahkannya untuk bisa tepat guna, untuk menghidupkan ekonomi mikro Indonesia,” ungkap Stefan.

Dalam pandangan Stefan, Sumitro adalah *bapak perkreditan rakyat*.



**Sumitro Djojohadikusumo,
Jakarta, 1999.**

foto:
TEMPO

“Kenapa beliau menekankan kredit dan perbankan? Karena beliau memahami benar, jika ekonomi itu diartikan tubuh manusia, jantungnya itu adalah bank. Kalau jantungnya tidak sehat dulu, ekonominya tidak akan jalan. Itulah briliannya Profesor Sumitro,” jelasnya dalam acara Peringatan 108 Tahun Sumitro.

Sumitro juga menekankan kewaspadaan terhadap utang luar negeri. Dengan *debt service ratio* yang sudah mencapai 32 persen, ia mengingatkan perlunya kebijakan yang mampu menarik investasi asing langsung, memperkuat ekspor, dan menyerap tenaga kerja.

“Jika itu tercapai, *debt service ratio* bisa ditekan hingga 20–25 persen dalam lima tahun,” katanya optimis. Namun ia menegaskan, pandangannya bukanlah ramalan, melainkan panduan untuk membuat keputusan yang bijak.

Bagi Sumitro, menghadapi masa depan berarti siap menghadapi kabut dan ketidakpastian. Itu menuntut kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan, menyusun strategi, dan meneladani praktik terbaik yang relevan. Ia juga tidak segan mengkritik praktik inefisiensi dalam ekonomi Indonesia, yakni monopoli, proteksionisme, dan intervensi kebijakan yang salah arah yang menambah biaya produksi, transportasi, dan perdagangan. Menurutnya, jalan keluar tidak cukup hanya lewat kebijakan moneter atau fiskal; yang dibutuhkan adalah reformasi struktural dan perbaikan institusi.

Warisan intelektual Sumitro tetap relevan hingga kini. Ia mengingatkan bahaya utang luar negeri, menyoroti

pentingnya investasi langsung dan ekspor, sekaligus mengkritik monopoli serta inefisiensi yang membebani rakyat.

Baginya, pembangunan tidak bisa berhenti pada angka dan grafik, tetapi harus menyentuh kehidupan manusia. Ekonomi, katanya suatu kali, adalah soal bagaimana kita mengurangi kesenjangan dan memperbaiki keseimbangan masyarakat.

Di Balik Julukan, Ada Hati yang Hangat

Bagi banyak orang, nama Sumitro Djojohadikusumo selalu identik dengan angka, kebijakan, dan pemikiran ekonomi yang besar. Tapi bagi mereka yang dekat dengannya, Sumitro adalah sosok yang jauh lebih hangat dan akrab.

Di ruang-ruang kelas, ia tak segan bercanda dengan murid, menertawakan kesalahan kecil mereka, atau sekadar menyelinapkan lelucon ringan di tengah diskusi serius. Di rumah, kesederhanaannya terpancar melalui pilihan hidup sederhana, waktu berkualitas bersama keluarga, dan perhatian tulus kepada orang-orang di sekitarnya.

Suatu kali, ketika diminta menilai perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia, Sumitro merendah.

“Saya kira saya tidak dapat disebut sebagai arsitek kebijakan ekonomi. Yang dapat saya klaim adalah bahwa saya sudah mengangkut sejumlah bahan bangunan. Para arsitek akan datang kemudian dan barangkali bisa memanfaatkan blok-blok bangunan saya,” ungkapnya.

Kata-kata itu memancarkan kerendahan hatinya sekaligus mencerminkan filosofi hidup yang ia pegang, yaitu ilmu pengetahuan dan pemikiran besar seharusnya tidak berhenti di buku atau perdebatan, tetapi harus hadir nyata dalam kehidupan rakyat dan dibalut dengan sentuhan kemanusiaan.

Sumitro mengingatkan kita bahwa di balik gelar, julukan, dan prestasi, selalu ada hati yang hangat. Hati yang menuntun pikiran dan tindakannya, sehingga ia dikenal tidak hanya sebagai *Begawan Ekonomi*, tetapi juga manusia sejati. (Gumilar Rachdityo Mumpuni & Rukmi Hapsari)

Timeline Sumitro Djojohadikusumo

1917¹

👤 Lahir 29 Mei
di Gombong,
Kebumen

★ Lulus studi di Nederlandsche Economische Hogeschool dan mendapat gelar doktor ekonomi, Rotterdam, Belanda dengan disertasi *Het Volkscredietwezen in de Depressie*

1943³



1945-1949⁴



👤 Aktif diplomasi; delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag, Belanda

➤ Staf Perdana Menteri Sutan Syahrir (1946)

➤ Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir)

- ★ • Rencana Urgensi Perekonomian (*Sumitro Plan*)
- Menggagas Program Benteng

1950-1951⁶

1947-1949⁵



- • Diplomat Indonesia
- Direktur Utama BTC & Presiden Direktur IBC



1935-
1938

2



- ★ Lulus pendidikan menengah, lanjut studi ke Netherlands School of Economics, Rotterdam & Universitas Sorbonne, Prancis (1937)



1952-
1953

8



Menteri
Keuangan
(Kabinet
Wilopo)



1951

7



Terpilih sebagai Ketua
Partai Sosialis Indonesia
(PSI)



Dekan FE-UI

1953

9



- Mendirikan LP EM FEUI
- Menerbitkan buku *Persoalan Ekonomi di Indonesia*

keterangan:



Peristiwa / Kehidupan Pribadi



Karier & Politik



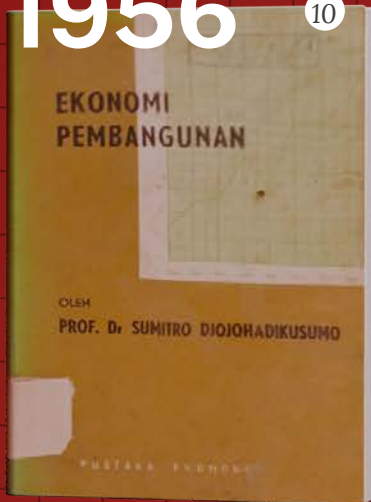
Akademik & Pemikiran / Karya

1955-
1956



- Mendirikan ISEI
- Menerbitkan buku *Ekonomi Pembangunan*

10



Menteri
Keuangan
(Kabinet
Burhanuddin
Harahap)



Menteri Riset & Teknologi
(Kabinet Pembangunan II)



- Menerbitkan buku *Masalah Penduduk dan Lapangan kerja, pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional* (1973)
- Menerbitkan buku *Indonesia Towards the Year 2000* (1975)



Konsultan di beberapa negara
(Malaysia, Thailand, Hong
Kong, Perancis, Switzerland,
Singapura)



Menerbitkan makalah *Indonesia:
Problems and Prospects*

1960-
1967

12



1972-
1978

14



1968-
1972

13



Menteri Perdagangan
(Kabinet Pembangunan I)

1958-
1960

➤ Menteri Perhubungan & Pelayaran (PRRI)



11



1990 17

➤ Menerbitkan Makalah
*The Emerging Indonesian
Economy in the Context of
Global Development*

1991 18

★ Mendirikan
PT Bank
Kesejahteraan
Ekonomi (BKE)



1987 16

★ Menerbitkan buku
*Perdagangan dan Industri
dalam Pembangunan*

1983 15

➤ Ketua Induk Koperasi
Pegawai Negeri (IKPN)

keterangan:

👤 Peristiwa / Kehidupan Pribadi

➤ Karier & Politik

★ Akademik & Pemikiran / Karya

1991 19

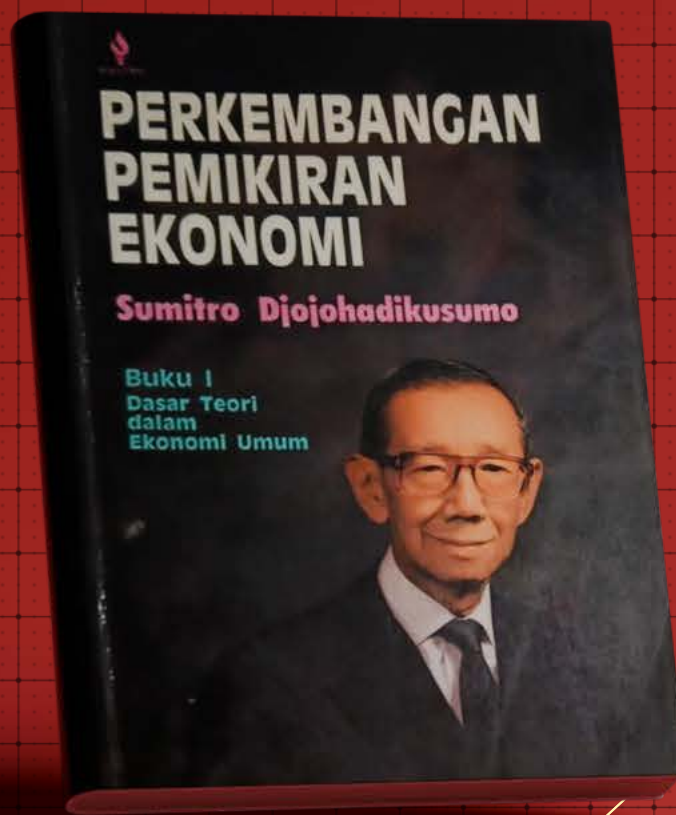
- ★ Menerbitkan buku *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Buku I

1994 20

- ★ Menerbitkan buku *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Buku II

1995 21

- ★ Menerbitkan makalah *Policy Issues of the Present and the Future*



desain
ilustrasi:
Biro KLI,
Kemenkeu

2001

22



Wafat 9 Maret di Jakarta;
dimakamkan di TPU Karet
Bivak



keterangan:



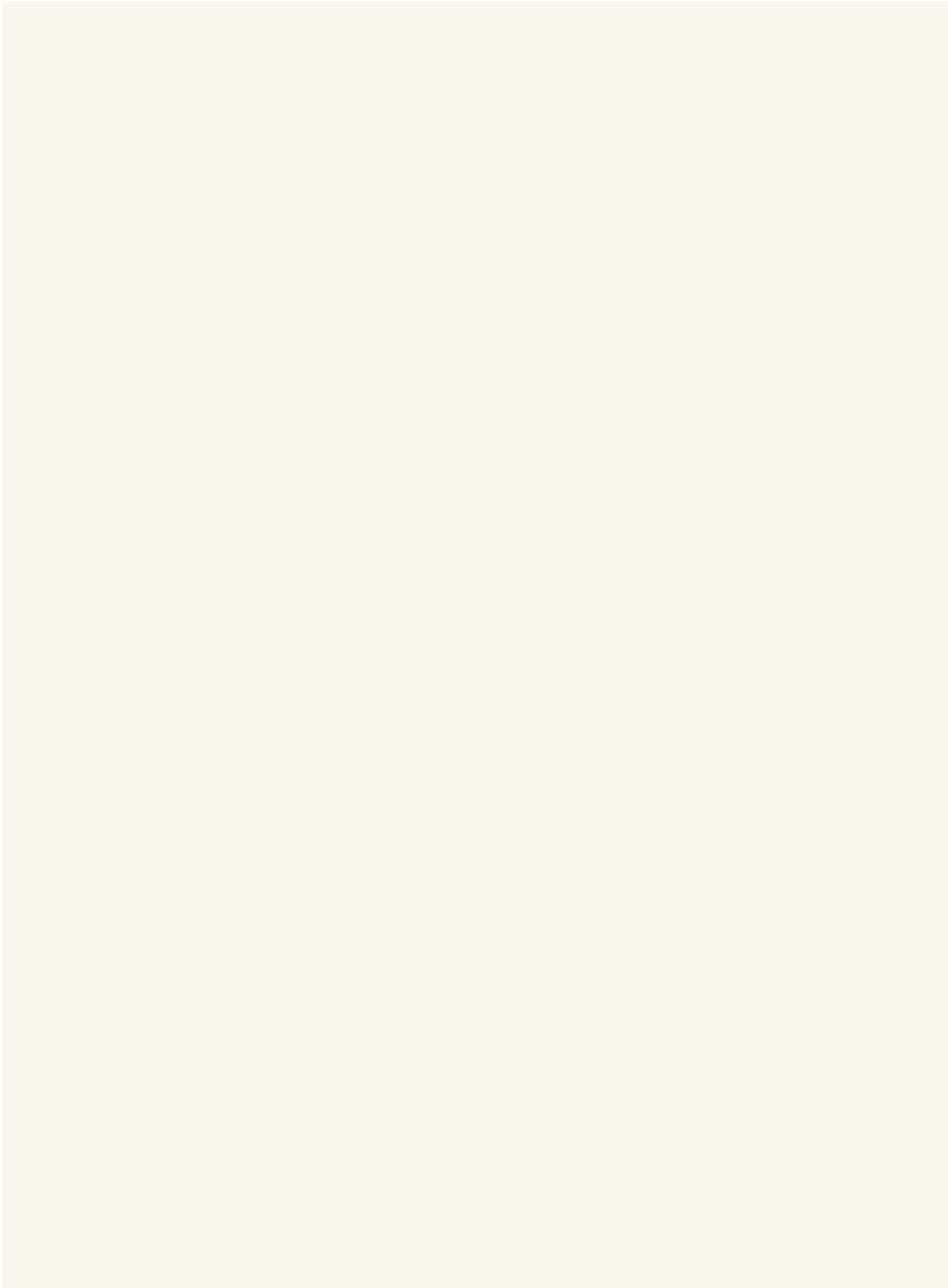
Peristiwa / Kehidupan Pribadi



Karier & Politik



Akademik & Pemikiran / Karya



COVER DETAIL:

Gedung Sumitro Djojohadikusumo beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2–4, Jakarta Pusat. Sebelum ditempati oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), gedung ini merupakan kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di bawah Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2013, setelah OJK resmi beroperasi penuh, gedung ini digunakan sebagai salah satu kantor pusat OJK yang menangani pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

foto:
Biro KLI,
Kemenkeu



**Hari
Oeang**

Kemenkeu Satu
Kawal Asta Cita